

## BAB V

### TEMUAN DAN ANALISIS

#### 5.1. Tata Kelola Kolaborasi Dalam Penanganan Kemiskinan di Kota Yogyakarta Program Gandeng Gendong

Kota Yogyakarta menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan asas otonomi daerah seluas-luasnya sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2018 tentang Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta dalam mewujudkan masyarakat sejahtera, maka dalam bentuk komitmennya lahirlah program Gandeng Gendong sebagai program bersama yang menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai kerjasama, kepedulian, kebersamaan, kemandirian dan kedisiplinan. Bentuk nyata pelaksanaan program ini, dikuatkan oleh lima *stakeholders*, Pemerintah Kota, Swasta, Perguruan Tinggi, Komunitas dan Kampung. Masing-masing *stakeholders* memiliki tugas dan wewenang dalam pelaksanaan program kemiskinan tersebut. Seluruh elemen lima *stakeholders* tersebut dalam rangka untuk percepatan pencapaian program penanggulangan kemiskinan,

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta melalui program Gandeng-Gendong.

Pemerintah sebagai aktor utama program Gandeng Gendong telah mengidentifikasi beberapa permasalahan yang ada di pemerintahan Kota Yogyakarta dilihat dari tiga aspek yaitu kondisi fisik, sosial dan ekonomi sebagai berikut;

Tabel 5.1 Kondisi Fisik, Sosial dan Ekonomi di Kota Yogyakarta

<b>Fisik</b>	<b>Sosial</b>	<b>Ekonomi</b>
1. Pengendalian pemanfaatan ruang kurang optimal	1. Pengendalian kependudukan	1. Kemiskinan dan ketimpangan tinggi
2. Air bersih terbatas, alih fungsi prasarana ruang publik, peran angkutan umum rendah	2. Optimalisasi sistem pelayanan kesehatan;	2. Pengangguran tinggi
3. Fasilitas penyediaan sanitasi belum	3. Pemenuhan akses pendidikan	3. Kesempatan kerja terbatas
4. implementasi dari <i>roadmap</i> belum selesai & manajemen kepegawaian belum berbasis kompetensi	4. Rendahnya penanganan terhadap masyarakat kelompok rentan	4. Pengelolaan pariwisata belum optimal
5. Kebutuhan produk hukum belum terpenuhi & layanan IT belum menjangkau semua SKPD	5. Optimalisasi pengembangan budaya lokal & pemberdayaan perempuan	
6. Upaya preventif pengendalian konflik SARA belum terkondisi	6. Optimalisasi pembinaan olahraga	
7. Penurunan partisipasi dan peran masyarakat & sistem penanganan bencana belum terpadu		
“Perlunya Pengembangan di Berbagai Sektor”		

Sumber : Diolah oleh Peneliti dari berbagai Sumber, 2019

Berdasarkan permasalahan diatas Kota Yogyakarta yang diidentifikasi dari tiga aspek baik itu kondisi fisik, kondisi sosial dan kondisi ekonomi maka perlu adanya sebuah kebijakan yang bisa *mengcover* tiga problem tersebut. Maka kemudian pemerintah Kota Yogyakarta membuat sebuah kebijakan *collaborative governance* dalam *mengcover* tiga permasalahan di atas tersebut yang dinamai

dengan program Gandeng Gendong. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta membuat surat edaran tentang program Gandeng Gendong;

SURAT EDARAN  
NOMOR: 510/3067/SE/2018  
TENTANG  
Program Gandeng Gendong

Dengan telah dilaksanakannya deklarasi Program Gandeng Gendong di Kota Yogyakarta pada tanggal 10 April 2018 sehingga perlu adanya gerakan bersama dalam penguatan peran semua stakeholder pembangunan dalam rangka mengembangkan nilai-nilai kemandirian, kepedulian, kedisiplinan dan kebersamaan yang telah ada, maka kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta untuk melakukan hal sebagai berikut :

1. Segera membuat daftar implementasi Program Gandeng Gendong yang sudah dan akan direncanakan secara detail yang dituangkan dalam format terlampir serta dilaporkan kepada Walikota Yogyakarta melalui Bappeda Kota Yogyakarta paling lambat tanggal 31 agustus 2018.
  2. Setiap perangkat daerah diwajibkan untuk menggunakan produk usaha mikro kecil Kota Yogyakarta untuk setiap kegiatan rapat koordinasi/seminar/workshop/saresehan dan kegiatan lainnya seperti jamuan makan minum, penyediaan ATK dll.
  3. Untuk kecamatan dan kelurahan diwajibkan untuk menggunakan produk usaha mikro kecil dari wilayah kerja setempat.
  4. Perangkat daerah yang membidangi usaha mikro kecil wajib mendampingi dan melakukan pembinaan terhadap usaha mikro kecil di wilayah Kota Yogyakarta.
- Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Kehadiran program Gandeng Gendong visi dan misinya berfokus pada masyarakat yang standar ekonominya menengah kebawah, yang pendapatan masyarakat Kota Yogyakarta tidak menentu atau tidak tetap. Visi dari program ini adalah *collaborative* dalam menangani sejumlah kemiskinan melalui (*soft skill* dan *hard skill*), dengan bergotong royong maka dengan mudah untuk mencapai program tersebut. Misinya meningkatkan partisipasi semua elemen *stakeholders* (Pemerintah Kota, Korporasi, Kampus, Kampung dan Komunitas) didalam setiap agenda pembangunan yang disusun dalam bentuk program Gandeng Gendong.

## **5.2. Collaborative Governance Program Gandeng Gendong**

*Collaborative governance* salah satu cara atau metode yang lebih efektif dalam pembangunan di era kontemporer sekarang, karena proses pembangunan tidak lagi berasal dari satu *stakeholder* tetapi berangkat berbagai *stakeholders*. Berbagai alasan pembangunan dimasa sekarang memerlukan kolaborasi dalam menyikapi permasalahan publik, bisa berupa kesamaan visi dan misi, karena jika dilakukan sendiri problem tersebut terasa sangat kompleks. Kolaborasi kalau dilihat secara umum bisa dibedakan ada dua pengertian pertama kolaborasi secara proses kedua kolaborasi secara normatif. *Collaborative governance* yang telah dilakukan oleh lima *stakeholders* (Pemerintah Kota, Korporasi, Kampus, Komunitas dan Kampung) ini dikategorikan kolaborasi dalam arti proses.

Hal demikian karena *collaborative governance* yang telah dilakukan itu bersifat interaktif di setiap para aktor pemangku kepentingan dan juga cenderung formal. Tidak hanya perilakunya saja, namun peneliti juga berusaha menganalisis proses kolaborasi yang dilakukan pemerintah sebagai pelaku utama dengan pihak *stakeholders* terkait efektif atau tidak pelaksanaan program Gandeng Gendong. Kolaborasi dalam arti proses yang telah dilakukan secara interaktif oleh pihak pemerintah Kota Yogyakarta dengan mitranya oleh penelitian bertujuan melihat proses *collaborative governance*.

Berawal dari pentingnya berbagai pihak yang terkait untuk ikut andil dalam upaya penurunan angka kemiskinan di Kota Yogyakarta maka sangat diperlukan penggalangan kekuatan secara bersama. Program Gandeng Gendong kenapa menjadi hal yang penting karena terdapat banyak sisi manfaatnya terhadap

masyarakat luas khususnya masyarakat Kota Yogyakarta. Berikut *collaborative governance* dilihat dari *face to face dialogue* (dialog/tatap muka), *trust building* (membangun kepercayaan), *commitment to process* (komitmen bersama), *share understanding* (pemahaman bersama) dan *intermediate outcomes* (hasil sementara).

### **5.2.1. Face to Face Dialogue (Dialog/Tatap Muka)**

Dialog/tatap muka yang dimaksud dalam *collaborative governance* yaitu berorientasi kepada konsensus atau kesepakatan bersama melalui tatap muka adalah langkah yang sangat penting dalam tahap kolaborasi. Tatap muka adalah proses inti yang dilakukan oleh para pihak pemangku kepentingan untuk membangun kepercayaan, pemahaman bersama, saling menghormati dan berkomitmen terhadap proses. *Face to face dialogue* yang dilakukan oleh lima *stakeholders* (Pemerintah Kota, Sawasta, Kampus, Komunitas dan Kampung) yaitu dalam bentuk pemberdayaan, pelatihan dan sosialisasi.

Pemberdayaan, pelatihan dan sosialisasi dilakukan setiap dari instansi masing-masing yang sesuai dengan tupoksi masing-masing dan setiap kegiatannya selalu berkolaborasi salah satu diantara empat tersebut. Dalam proses pelaksanaan kolaborasinya masing-masing saling melengkapi antar *stakeholders* yang terkait. Fungsi pemberdayaan, pelatihan dan sosialisasi yaitu untuk memberi kemudahan komunikasi dalam mencapai tujuan bersama program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta. Selain memberi kemudahan komunikasi juga sarana untuk membangun kepercayaan setiap *stakeholders*, ini bisa dilihat dari *stakeholdersnya* jika melakukan pemberdayaan, pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta jum'at februari 2019, melakukan agenda sosialisasi sejumlah program Gandeng Gendong sebagai langkah awal prioritas, agar program tersebut dengan mudah dipahami masyarakat. Tempat sosialisasi tersebut tepatnya di Pendopo Kelurahan Panembahan, Jalan Langenastran Lor Kota Yogyakarta, agenda sosialisasi tersebut sebagai narasumber Retnosari, SH, MH staf DPMPPA dan Agus Salimi, SE, MA staf Bappeda, ikut dihadiri mulai dari ketua RT se Kelurahan Panembahan Kecamatan Keraton.

Materi dalam sosialisasi program tersebut memuat tentang *roadmap* masalah Kota Yogyakarta dan maksud kehadiran program Gandeng Gendong sebagai solusi terhadap masalah tersebut. Program Gandeng Gendong bahwa berdasarkan *roadmap* sudah memiliki potensi dan kekuatan masing-masing di setiap daerah, ada suatu daerah yang kuat potensi kesenian, ada yang memiliki potensi dibidang kuliner, dan ada yang memiliki potensi masak memasak. Maka kemudian tujuan kehadiran program Gandeng Gendong tersebut untuk mengatur dan menyesuaikan mana daerah yang memiliki potensi dan daerah yang tidak memiliki potensi.

Program Gandeng Gendong yang membidangi masalah kuliner yaitu dimandatkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA). Tugasnya memberikan sosialisasi, pemberdayaan dan pelatihan terhadap semua kelompok yang ada se Kota Yogyakarta, kemudian rutin mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap program tersebut. Dibidang

kuliner program Gandeng Gendong kehadirannya sangat memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian sebagian masyarakat Kota Yogyakarta.

Program Gandeng Gendong juga memiliki aplikasi Nglarisi adalah sebuah layanan dalam aplikasi JSS (*Jogja Smart Service*) untuk pemesanan nasi kotak dan *snack* jamuan rapat dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta pada Penyedia Jasa Kuliner, sebagai bagian dari program Gandeng Gendong. Aplikasi Nglarisi JSS diharapkan mampu membantu tercapainya tujuan dari Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan, dengan pemberdayaan masyarakat terutama anggota KMS (Kartu Menuju Sejahtera). Berikut tahapan untuk melakukan proses registrasi aplikasi layanan Nglarisi di *Jogja Smart Service* pada program Gandeng Gendong;

Bagan 5.1  
Alur Registrasi Aplikasi Nglarisi di *Jogja Smart Service*



- a. Tahapan penggunaan aplikasi Nglarisi
  1. Buka *google play store* pada menu *Handphone*, ketik JSS Jogja di kolom pencarian.
  2. Klik *Jogja Smart Service*, klik Instal.
  3. Buka aplikasi JSS, klik “Daftar Di Sini”, isikan data pada kolom, centang pada kotak syarat dan ketentuan, klik Daftar.
  4. Cek *Email* masuk, judul “Aktivasi Akun *Jogja Smart Service*”, klik Aktivasi Akun.

5. Cek sms berisi kode verifikasi yang masuk di nomor *Handphone* yang didaftarkan.
6. Masukkan kode verifikasi dan klik Verifikasi.
7. Buka aplikasi JSS, masukkan NIK/*Username* dan *Password*, klik *login*, pada menu layanan umum pilih Nglarisi.

Kegunaan aplikasi Nglarisi sebagai tempat transaksi antara pihak konsumen dengan pihak UKM, karena awal diluncurkan aplikasi tersebut untuk membantu proses transaksi antara penyedia UKM dengan pihak Pemkot sebagai konsumen produk UKM masyarakat Kota Yogyakarta. Kelebihan dari aplikasi Nglarisi tersebut untuk meminimalisir jangan sampai kasus penundaan pembayaran oleh pihak konsumen tidak terulang kembali dan memudahkan bagi pelaku UKM untuk memasarkan produk-produk yang telah dihasilkan. Kelompok kuliner program Gandeng Gendong yang bergabung dengan aplikasi Nglarisi berjumlah 104 kelompok dengan 1.403 anggota. Antusias masyarakat Kota Yogyakarta sangat positif terhadap program Gandeng Gendong yang diluncurkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta dan beberapa *stakeholder* yang lain.

b. Syarat menjadi penyedia Gandeng Gendong

1. Berbentuk kelompok usaha beranggotakan 5-20 orang
2. Semua anggota tinggal dalam satu kelurahan yang sama, dan terdapat minimal 2 orang anggota dengan KMS (Kartu Menuju Sejahtera)
3. Semua anggota warga KTP Kota Yogyakarta
4. Koordinator memiliki NPWP Kota Yogyakarta
5. Koordinator memiliki rekening BPD

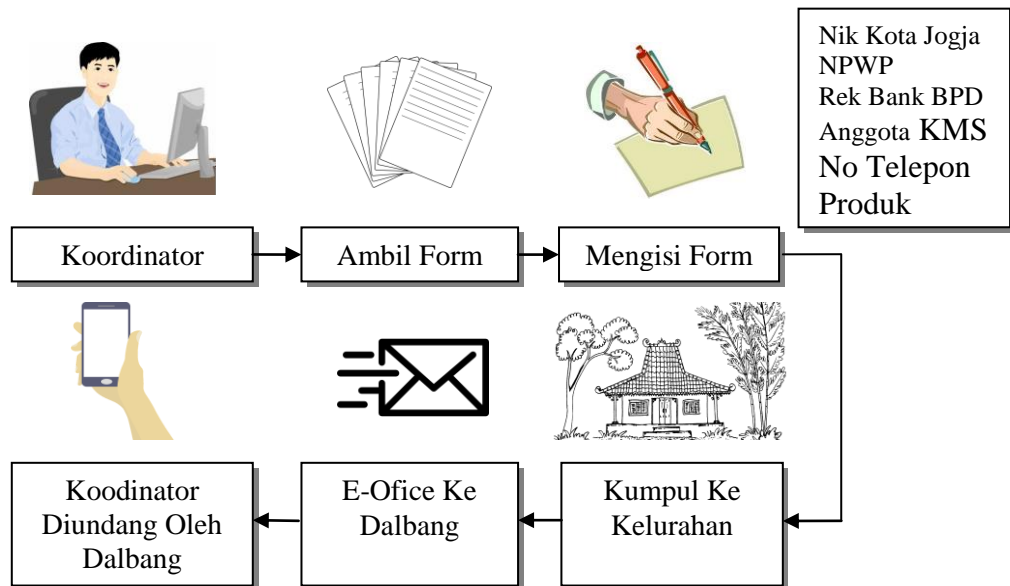


6. Koordinator menggunakan *Handphone* dengan *Operation System Android*

c. Pendaftaran penyedia Gandeng Gendong

1. Mengisi formulir pendaftaran yang bisa diperoleh di Kelurahan setempat atau bagian administrasi dan pengendalian pembangunan Pemkot Yogyakarta
2. Formulir diserahkan ke kelurahan masing-masing
3. Kelurahan akan mengirimkan surat via *e-office* ke bagian administrasi dan pengendalian pembangunan
4. Bagian administrasi dan pengendalian pembangunan akan mengundang untuk koordinasi

Gambar 5.1  
Alur Pendaftaran Program Gandeng Gendong



Gambar 5.1 diatas alur pendaftaran program Gandeng Gendong yang bagian kuliner, bagi masyarakat yang ingin bergabung dengan program ini mendatangi koordinator kemudian langsung mengambil formulir pendaftaran.

Selanjutnya mengisi formulir dengan mengisi (Nik Kota Jogja, NPWP, Rek Bank BPD Anggota KMS, No Telepon Produk) dan kumpul di kelurahan untuk memastikan struktur yang jelas terhadap kelompok tersebut, kemudian *e-office* ke dalbang baru setelah itu pihak koordinator diundang oleh dalbang.

#### 5. Konsep Gandeng Gendong

Program Gandeng Gendong dibidang kuliner memiliki struktur koordinator dan anggota, yang mana fungsi atau tugas koordinator sebagai ketua disetiap kecamatan dan kelurahan. Ketua mengkoordinir anggotanya baik anggota yang mengurus Nasi *Box* atau *Snack* maupun diantara anggota ada yang menyediakan Nasi *Box* dan *Snack* untuk menyuplai ke setiap OPD Kota Yogyakarta, tempat wisata maupun OPD DIY.

Tabel 5.2 Koordinator dan Anggota Program Gandeng Gendong

KOORDINATOR		
Nasi Box	Snack	
Koordinator	Roti	Anggota
Anggota	Martabak	Anggota
	Puding	KMS
	Air Mineral	Anggota

#### 6. Penyedia Gandeng Gendong :

1. Omzet di bawah 4,8 Milyar (Wajib Pajak Final 0,5%)
2. Bukan jasa catering dan yang dijual berupa barang makan minum
3. UMKM usaha yang memiliki omzet tidak lebih dari 4,8 milyar

Dalam rangka untuk memudahkan upaya penurunan angka kemiskinan bagi masyarakat Kota Yogyakarta, pemerintah kota membuat aplikasi Nglarisi dan membuat kelompok disetiap kecamatan dan kelurahan. Langkah ini dilakukan karena bisa secara cepat mengakomodir masyarakat yang tidak memiliki *market place* terutama.

Program *collaborative governance* Gandeng Gendong Kota Yogyakarta memiliki banyak program didalamnya, namun yang paling cepat perkembangannya adalah program kuliner (nasi *box* dan *snack*). Hal tersebut dijelaskan oleh Ibu Retnanigtyas, SSTP, MIP Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMPPA Kota Yogyakarta bahwa:

“Program unggulan dari Gandeng-Gendong salah satunya kuliner, dari 114 Kelurahan 43 Kelurahan 14 Kecamatan, awal mula dilaksanakan mei-juni 2018, hingga sekarang hasil dari perkelompok bisa mencapai 30-70 juta perbulan, program kuliner ini *GoFoodnya* pemerintah Kota Yogyakarta karena setiap OPD menggunakan kuliner ini, dan dampak positifnya lagi UKM bisa terserap dengan baik, CSR yang sebelumnya hanya diminta kewajibannya ketika acara besar seperti 17 an agustus dan lain sebagainya tapi sekarang tidak, telah dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat seperti bimbingan dan pelatihan seperti kuliner dan kreativitas lainnya, jika dihitung besaran pendapatan dari keseluruhan kelompok kuliner maka 1 milyar perbulan, tantangan program ini masalah pembayaran non tunai missalnya Pemerintah Kota Yogyakarta memesankan makanan tidak secara langsung dibayar namun akhir bulan baru bisa dibayar sehingga mengganggu kestabilan modal, butuh ekstra pendampingan karena pola pikir atau mindset masyarakatnya masih berpikir cara lama kurang kreatif, dan peningkatan SDM serta pelayanan” (Wawancara tanggal 23 Agustus 2019 Jam 13.33 Wib).

Program Gandeng Gendong yang bagian kuliner nasi *box* dan *snack* mengalami peningkatan yang sangat signifikan terhadap pendapatan masyarakat Kota Yogyakarta. Sejak mei-juni 2018 mulai dilaksanakan program kuliner perkembangannya selalu mengalami peningkatan konsumennya, dari 2018 jumlah konsumennya Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi, Kampus namun 2019 mengalami peningkatan jumlah konsumennya bertambah Kelurahan, Kecamatan dan masyarakat umum. CSR setelah program Gandeng Gendong hadir lebih terarah bantuannya ke masyarakat Kota Yogyakarta berbeda dari yang sebelumnya. Kemudian program Gandeng Gendong yang bagian kuliner perlu

ekstra pendampingan pelatihan (*soft skill* dan *hard skill*) karena kemampuan masyarakat dalam memproduksi aneka kuliner perlu kemampuan lebih.

Hal senada juga diakui oleh Ibu Fitri Sulistyowati Anggota Kelompok Gandeng Gendong dari Bausasaran DN3/602 Kecamatan Danurejan YK menyatakan bahwa;

“..Saya termasuk kelompok pertama program Gandeng Gendong yang awal programnya tidak semua aktif, program ini telah membantu pendapatan saya hingga 100% karena didukung oleh konsumen yang jelas misalnya dari Balaikota atau OPD, di Perpustakaan Wilayah dan daerah Pariwisata, tantangannya memang cukup berat karena semua makanan atau snack itu harus siap tersedia di suply kesemua konsumen sekitar jam 11:00, program ini hanya menyediakan *market place* untuk masyarakat dan modal masih ditanggung masing-masing individu atau kelompok, harapan dari program ini semoga masalah pembiayaan tidak lagi bermasalah telat membayar hingga 2 minggu sampai 1 bulan, karena 1 OPD 50 Kotak Nasi 50 *snack* jika dihitung itu sangat mengganggu kestabilan modal, selanjutnya CSR dari swasta belum ada tindakan nyata dalam bentuk pelatihan” (Wawancara tanggal 26 Agustus 2019 Jam 14.43 Wib).

Kota Yogyakarta memang menjadikan program Gandeng Gendong fokus terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang perekonomiannya atau pendapatan menengah kebawah. Hal tersebut benar di akui keberhasilannya oleh Ibu Fitri Sulistyowati Anggota Kelompok Gandeng Gendong dari Bausasaran DN3/602 Kecamatan Danurejan YK bahwa perekonomiannya meningkat hingga 100%. Perekonomian Ibu Fitri Sulistyowati meningkat hingga 100% didukung oleh sejumlah *market place* yang jelas yaitu Balaikota atau OPD Kota Yogyakarta, Perpustakaan Wilayah dan daerah Pariwisata lainnya.

Bahwa sebelum kehadiran program Gandeng Gendong tersebut perekonomian masyarakat Kota Yogyakarta mengalami kesulitan berkembang karena *market placenya* tidak jelas dan masyarakat belum secara serius diberikan

pelatihan *soft skill* dan *hard skill*. Selanjutnya juga diakui oleh Ibu Fitri Sulistyowati bahwa program *collaborative governance* ini memiliki problem tentang pembayaran non tunai dan minimnya sosialisasi dan pelatihan dari pihak korporasi.

Senada dengan pernyataan diatas juga di sampaikan oleh Ibu Asri Mikatsih Ketua Kelompok Gandeng Gendong dari Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan sebagai berikut:

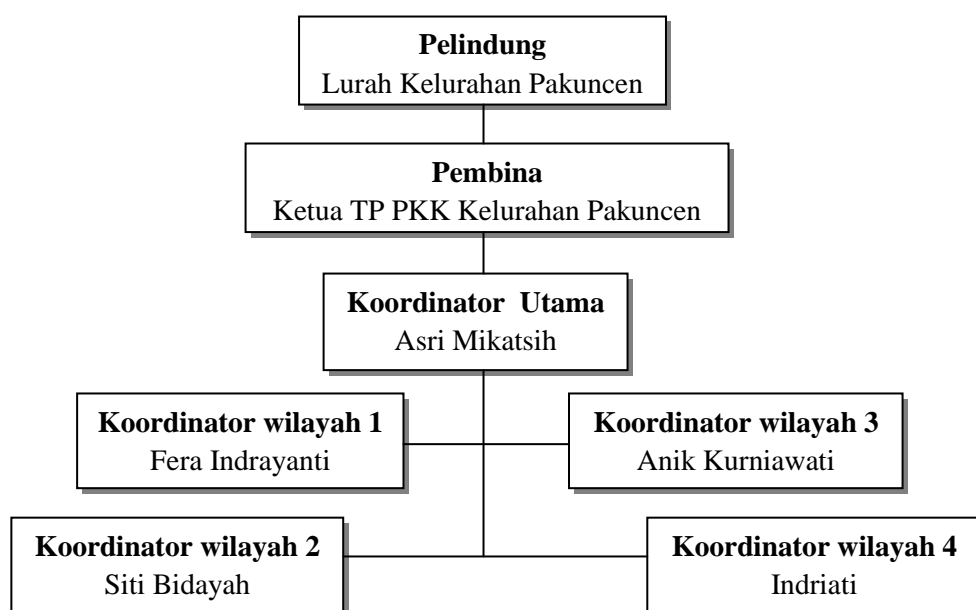
“..Saya bergabung di program Gandeng Gendong Oktober 2018, program ini sangat menyentuh kepada masyarakat, karena ibu-ibu rumah tangga merasakan sendiri dampak dari program ini yang sebelumnya hanya sebagai ibu rumah tangga tapi sekarang sudah ada kerjaan, sekarang kelompok kami Pakudaya mendapat pesanan dari Kampus, Pemerintah Provinsi DIY dan Pemerintah Kota Yogyakarta, namun kami juga menemui kesulitan masalah SDM (produksi, ketepatan waktu pesanan dan kendala modal) saya sebagai ketua kelompok mengambil inisiatif sendiri untuk masalah modal saya pinjam uang ke Bank, karena efek dari bayaran dari para pelanggan (OPD DIY) yang telat hingga akhir bulan, dan masalah CSR pelatihan hanya 1 kali, menyuplai ke hotel cuma 1 kali karena SOP di hotel kami merasa terlalu ribet dan standar antara ke OPD dengan ke hotel itu berbeda yang lebih mudah ke OPD jadi kami hanya memberi pesanan ke OPD saja, harapan program ini setiap kelompok disemua kelurahan se Kota Yogyakarta memiliki unit organisasi yang terstruktur, kesempatan ibu-ibu mendapat pekerjaan yang tetap dan pelatihan diperbanyak lagi (Wawancara tanggal 04 September 2019 Jam 16.36 Wib).

Program Gandeng Gendong telah banyak menysasar ke berbagai lapisan masyarakat Kota Yogyakarta tidak hanya membantu kalangan pelaku UKM tapi ibu rumah tangga yang belum memiliki pekerjaan. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa program Gandeng Gendong telah memberikan perubahan yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat Kota Yogyakarta. Namun perlu menjadi evaluasi bersama bahwa program Gandeng Gendong belum maksimal dalam pelaksanaannya terutama tentang sosialisasi, pemberdayaan dan pelatihan.

Selanjutnya pembayaran non tunai yang semua pelaku UKM mengeluhkan, karena di anggap mengganggu kestabilan modal mereka, dan pembinaan dari korporasi belum maksimal kemudian termasuk untuk mengakses produk-produk UKM ke Hotel mengalami kesulitan karena SOP yang terlalu sulit bagi masyarakat.

Berikut gambaran salah satu kelompok kuliner program Gandeng Gendong Kelompok Pakudaya *Culinary* yang dipimpin oleh Ibu Asri Mikatsih Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan sebagai berikut;

Gambar 5.2  
Susunan Pengurus Pakudaya *Culinary*



Tujuan dibentuknya program Gandeng Gendong Pakudaya *Culinary* Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Satu usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat yang telah diinisiasi Pemerintah Kota Yogyakarta dan merupakan satu program pemberdayaan

masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan

2. Program Gandeng Gendong tersebut melibatkan 5 elemen mulai dari Pemerintah Kota, Korporasi, Kampus, Kampung dan Komunitas. Kelima lembaga ini bahu membahu mempercepat pengentasan kemiskinan. Pakudaya *Culinary* sebagai bagian dari "Gandeng Gendong" dengan fokus pemberdayaan masyarakat sesuai potensi wilayah, yaitu sebagai penyedia jasa kuliner dalam hal ini penyedia jamuan rapat *Snack*, makanan kecil dan makanan berat (nasi *Box*)

Visi :

Pakudaya *Culinary* sebagai satu wadah usaha kuliner untuk meningkatkan usaha pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat terutama warga masyarakat Kelurahan Pakuncen

Misi :

Membangun semangat gotong royong untuk sejahtera dan maju bersama

Pertumbuhan Pakudaya *Culinary* dari Oktober 2018 s/d Juni 2019 pertama dibentuk bulan September 2018, setelah mendapat pembinaan dari DPMPPA melalui program PermakJasKota. Pakudaya *Culinary* benar-benar dibentuk dan berawal dari nol, tanpa modal dan tanpa order dari pihak manapun. Pertama mendapat order dari organisasi pemerintah daerah Pemerintah Kota Yogyakarta pada tanggal 5 Oktober 2018. Dari sinilah Pakudaya *Culinary* berkembang seiring waktu dan saat ini sudah masuk ke beberapa kantor dinas provinsi, kampus, Hotel

serta swasta. Perkembangan kelompok Pakudaya *Culinary* Pakuncen sudah lumayan cukup berhasil sejak dari awal didirikan hingga sekarang, keberhasilan berdampak pada ekonomi kalangan ibu-ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap.

Pertumbuhan usaha di Pakudaya *Culinary* mengalami peningkatan dari bulan ke bulan dan mendapat sambutan baik dari beberapa Organisasi Pemerintah Daerah di Kantor Pemerintah Kota Yogyakarta dan Kantor Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini tentu saja berkat kerjasama dan kerja keras bersama kelompok Pakudaya *Culinary*.

Berikut beberapa hal yang menjadi perhatian kelompok Pakudaya *Culinary* Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan program Gandeng Gendong untuk dapat bertahan sampai saat ini :

1. Manfaatkan kesempatan seoptimal mungkin kesempatan sebagai satu dari sekian banyak penyedia jasa kuliner untuk jamuan rapat di Pemerintah Kota Yogyakarta
2. Menetapkan margin keuntungan secara proposional dan semangat pemberdayaan masyarakat adalah hal yang lebih utama.
3. Kualitas adalah yang utama, Rasa, variasi menu, penyajian dan ketepatan waktu adalah kunci utama kepercayaan konsumen terhadap layanan kita. *Service Excellent*, berikan pelayanan sebaik mungkin, dengarkan dan terima semua komplain, kritik dan saran sebagai satu tahap pembelajaran untuk lebih meningkatkan mutu layanan kita.



4. Jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, terima tantangan baru dan selalu berani keluar dari Zona Nyaman, belajarliah dari pengalaman sendiri, banyak hal menarik yang akan lebih mendewasakan cara berpikir kita.

Beberapa hal yang saat ini menjadi masalah dan kendala internal kelompok Pakudaya *Culinary* Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta sebagai berikut :

1. Kurangnya jiwa wirausaha dan pelayanan prima di internal kelompok, yang notabene masih menganggap usaha ini sebagai usaha sampingan keluarga.
2. Pada saat bulan tertentu, dimana kegiatan Organisasi Pemerintah Daerah mengalami peningkatan tajam, masalah modal menjadi masalah utama.
3. Kemampuan anggota (*skill*) untuk variasi dan penyajian jamuan makan masih sangat kurang.

Harapan dan Impian kelompok Pakudaya *Culinary* Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta :

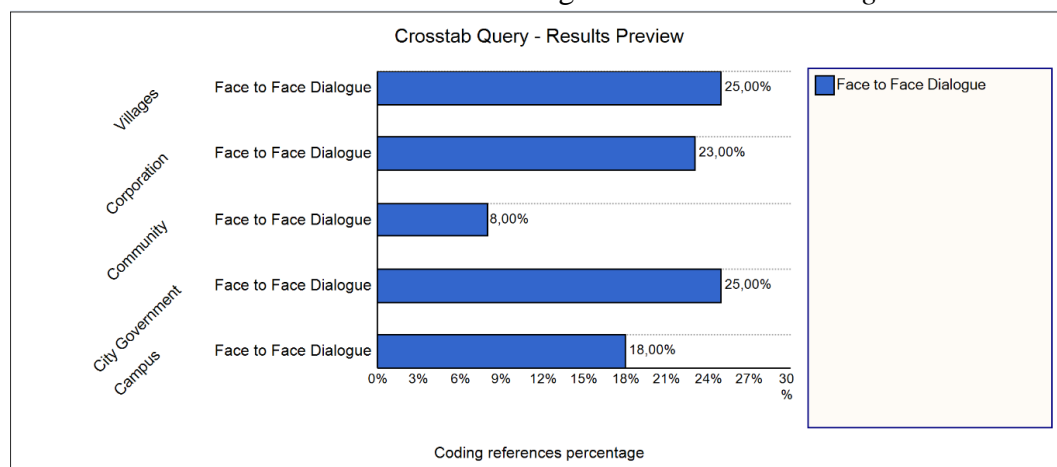
1. Pakudaya *Culinary* sebagai wadah pembelajaran bagi tumbuhnya kelompok usaha baru terutama bidang penyedia jasa kuliner dari wilayah Kelurahan Pakuncen. Diharapkan dari Pakudaya muncul kelompok-kelompok baru yang mandiri dan dapat meningkatkan usahanya dengan menggandeng masyarakat sekitar.

2. Pakudaya bersinergi dengan TKPK Kelurahan Pakuncen dalam upaya pengentasan keluarga miskin (KMS), menguramngi angka KMS di tingkat kelurahan melalui pemberdayaan keluarga.
3. Pakudaya *Culinary* menjadi unit usaha untuk peningkatan ekonomi keluarga yang dikelola secara profesional dan menjadi tumpuan penghidupan bagi warga masyarakat kelurahan Pakuncen.

Perkembangan kelompok Pakudaya *Culinary* program Gandeng Gendong Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta sangat signifikan kemajuannya. Kelompok Pakudaya *Culinary* salah satu kelompok program Gandeng Gendong yang bagian kuliner cukup sukses baik dalam hal penjualan dan manajemen organisasi kelompoknya.

*Collaborative governance* dalam program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh lima *stakeholders* (Pemerintah Kota, Korporasi, Kampus, Komunitas dan Kampung) dengan *face to face dialogue* sebagai berikut;

Gambar 5.3  
*Collaborative Governance dengan Face to Face Dialogue*



Sumber : Data diaolah dengan Nvivo 12 Plus, 2019

Berdasarkan gambar 5.3 di atas *collaborative governance* dengan *face to face* yang paling dominan dilakukan dari *stakeholders* Pemerintah Kota 25,00% dengan Kampung 25,00%. Kemudian menyusul Korporasi 23,00%, Kampus 18,00% dan terakhir adalah Komunitas 8,00% yang paling rendah partisipasi dalam dialog atau tatap muka dengan program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta.

### **5.2.2. Trust Building (Membangun Kepercayaan)**

Membangun kepercayaan yang dimaksud adalah bahwa peran aktor pembuat kebijakan tidak hanya bernegosiasi antar sesama para *stakeholders*, namun membangun kepercayaan antar sesama pemangku kepentingan. *Collaborative governance* hadir adalah bentuk dari kurangnya kepercayaan antara *stakeholders* sehingga memerlukan sikap saling bekerja sama antar sesama pemangku kepentingan. *Trust building* dalam program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta masih bersifat dalam bentuk parsial yaitu sebagian, karena bentuk komunikasinya dan juga koordinasinya masih belum menyeluruh.

Penyebab hal tersebut karena masing-masing *stakeholders* masih terhalangi oleh kesibukan pekerjaan di instansi masing-masing, sehingga menimbulkan ada perbedaan pendapat dan akhirnya kesulitan untuk memaksimalkan program yang telah ditetapkan. Hal demikian sebagaimana yang telah di jelaskan oleh Bapak Drs. Purnama Hadi Utama, MT Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kota Yogyakarta menyebutkan bahwa:

“Program ini memang fokus pada masyarakat miskin, disetiap kecamatan dibentuk kelompok daerah untuk menyediakan jamuan atau penyediaan konsumsi kepada setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta lewat pemesanan makanannya dengan aplikasi JSS (*Jogja Smart Service*) dan diwajibkan bagi OPD

dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memakai produk UKM dari masyarakat, terkait CSR sejak dimulainya program ini lebih di arahkan fokus pada program Gandeng Gendong, dan dari 5 *stakeholders* Bappeda memfasilitasi semua arah kebijakan, tantangan program ini kesulitan dari pihak swasta memobilisasi kegiatan, selanjutnya program ini akan ditambah dalam menangani permasalahan sampah di 52 Warmindo dengan diberi pelatihan cara menangani sampah” (Wawancara tanggal 03 September 2019 Jam 09.08 Wib).

Berdasarkan keterangan dari Kabid Ekonomi Bappeda Kota Yogyakarta di atas bahwa program Gandeng Gendong melibatkan semua unsur yang kemudian dalam bentuk *collaborative governance*. Masyarakat Kota Yogyakarta yang ekonominya mayoritas menengah kebawah menjadi skala prioritas dari program tersebut. Kehadiran program tersebut memberikan tempat yang sesuai dengan peran masing-masing, masyarakat Kota Yogyakarta sebagai objek baik dari unsur OPD Kota dan Provinsi yang menggunakan jasa mereka. Pemerintah Kota Yogyakarta dan *stakeholder* yang lain sebagai subjek dari program tersebut yaitu membantu baik sebagai pembuat kebijakan maupun sumbangan dalam bentuk pemikiran dan material.

Dalam pelaksanaan program Gandeng Gendong Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai pemilik utama otoritas kebijakan tugasnya melakukan monitoring dan evaluasi. Lebih kurang selama dua tahun berjalannya program Gandeng Gendong banyak memberi manfaat terhadap masyarakat, tidak hanya warga Kota Yogyakarta yang menikmati hasil atau produk program Gandeng Gendong namun sudah meluas ke pemerintah provinsi DIY. Pihak swasta atau korporasi selain tugasnya memberi CSR juga ikut memberikan pemberdayaan, pelatihan (*soft skill* dan *hard skill*) dan membantu dalam mempromosi produk-produk yang telah dibuat oleh masyarakat Kota Yogyakarta yang tergabung dalam

program Gandeng Gendong. Namun peran dari pihak korporasi di akui oleh Kabid Ekonomi Bappeda Kota Yogyakarta bahwa dalam pelaksanaannya belum maksimal dari program yang telah ditetapkan.

Kemudian juga terjadi *overlapping* (tumpang tindih) kepentingan, hingga akhirnya sulit tercipta kegiatan yang efektif dan efisien. Proses kolaborasi lima *stakeholders* (Pemerintah Kota, Swasta, Kampus, Komunitas dan Kampung) dalam program Gandeng Gendong boleh dikatakan masih berfokus pada kegiatan masing-masing. Dalam membangun kepercayaan disetiap *stakeholders* tersebut masih belum terjalin dengan baik karena setiap dari instansi cara berfikirnya individualistik atau ego sektoral.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan juga berkoordinasi dengan pihak komunitas atau kelompok masyarakat yaitu memberikan wadah atau asosiasi forum usaha mikro dan kecil dalam pengembangannya. Selanjutnya melakukan konsolidasi inter dan antar komunitas, juga memberi usulan kebutuhan dalam mengembangkan usaha mikro dan kecil. Hal serupa juga di ungkapkan oleh Bapak Misbaharudin, S.Ag Komisi Bidang Agama dari pihak Komunitas dan beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Baznas Kota Yogyakarta mengatakan bahwa:

“..Baznas lembaga kementerian Agama yang berkolaborasi dengan pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal kebijakan, berupa pemberdayaan masyarakat (*skills*) peningkatan spiritualitas masyarakat dan terkait dengan kebijakan Gandeng Gendong peran dari Baznas mencari celah yang tidak dilakukan oleh *stakeholders* yang lain (Pemerintah Kota, Korporasi, Kampus, Kampung) dalam hal peningkatan spiritualitas masyarakat yang efek dari gangguan sosial lainnya, sebelumnya juga memiliki program berawal dari tahun 2011 ada 5 program; Jogja Takwa, Jogja Cerdas, Jogja Sejahtera, Jogja Peduli, Jogja Sehat dan terkait Gandeng Gendong Baznas juga memiliki pilot project yaitu Kampung Takwa dan Kampung Pintar (Benar Tegal Rejo), tahun 2016 fokusnya ke kemiskinan, pendidikan dan program

ini memberi bantuan berupa *financial* syaratnya bisa baca Al Qur an, aktif ke masjid dan pemberdayaan muallaf dan memang fokus program ini dari hulu hingga hilir Modal, SDM, Pemasaran” (Wawancara tanggal 27 Agustus 2019 Jam 20.02 Wib).

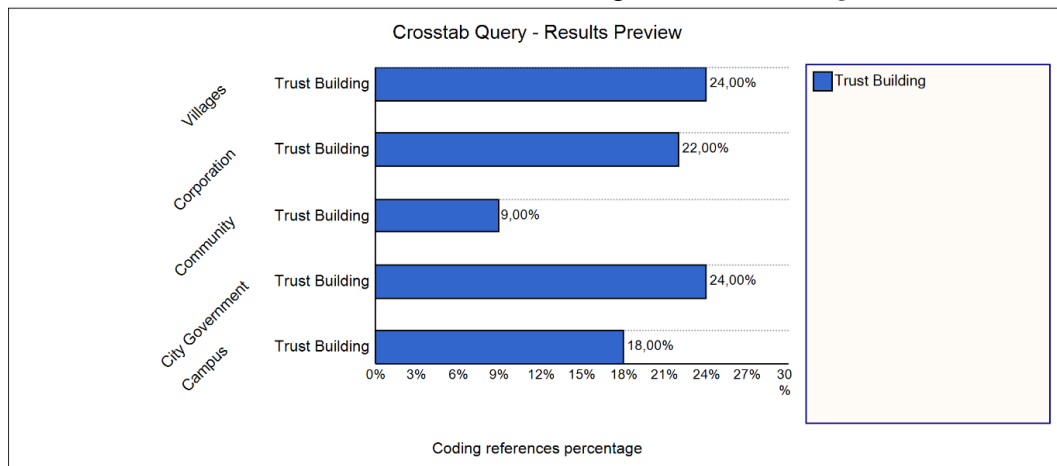
Peran dari komunitas sebagai pembantu kumpulan pekerja atau profesi, hobi dan minat, pemerhati masalah sosial, ekonomi dan seni budaya yang peduli untuk membantu masyarakat. Dalam hal ini peneliti mewawancarai Bapak Misbaharudin, S.Ag bahwa peran dari komunitas ikut memberikan pembinaan terhadap masyarakat Kota Yogyakarta. Komunitas memiliki banyak kelompok yang membidangi seperti Lembaga Pendamping Usaha Buruh Tani Nelayan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Baznas Kota Yogyakarta. Dalam program Gandeng Gendong peran dari Baznas Kota Yogyakarta ikut memberikan pemberdayaan terhadap masyarakat.

Terutama dalam pembinaan spiritualitas masyarakat Kota Yogyakarta yang minim pengetahuan agama, maka peran dari Baznas memberikan pembinaan baca Al-Qur an dan ilmu agama lainnya. Pembinaan tentang agama termasuk prioritas yang utama dalam program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta karena kemiskinan tidak hanya secara materi tetapi rohani juga membutuhkan pembinaan. Kegiatan sebelumnya juga tidak hanya melakukan pembinaan namun memberikan kebutuhan secara *financial* dan memberdayakan para muallaf. Baznas juga memiliki daerah pembinaan atau pilot project yaitu Kampung Takwa dan Kampung Pintar (Benar Tegal Rejo).

Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta dalam berkolaborasi dengan membangun kepercayaan (*trust building*) cukup signifikan proses akselerasinya dalam meningkatkan perekonomian. *Collaborative governance* dalam program

Gandeng Gendong Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh lima *stakeholders* (Pemerintah Kota, Korporasi, Kampus, Komunitas dan Kampung) dengan *trust building* sebagai berikut;

Gambar 5.4  
*Collaborative Governance dengan Trust Building*



Sumber : Data diaolah dengan Nvivo 12 Plus, 2019

Gambar 5.6 bahwa *collaborative governance* dengan *trust building* dalam program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta bahwa yang dominan yaitu Pemerintah Kota 24,00% dengan Kampung 24,00%. Kemudian dalam membangun kepercayaan yang belum maksimal yaitu dari pihak Korporasi 22,00%, Kampus 18,00 dan terakhir Komunitas 9,00%.

### 5.2.3. *Commitment to Process* (Komitmen Bersama)

*Commitment to process* yang dimaksud adalah bahwa tingkat komitmen antar *stakeholders* itu merupakan penentu bagi keberhasilan atau kegagalan *collaborative governance*. Selanjutnya komitmen adalah modal keyakinan untuk *collaborative process* yang nantinya akan menciptakan suatu keuntungan, baik bagi aktor pembuat kebijakan maupun publik. Proses kolaborasi yang dilakukan

oleh lima *stakeholders* (Pemerintah Kota, Swasta, Kampus, Komunitas dan Kampung) dalam program Gandeng Gendong dengan komitmen berdampak positif terhadap masyarakat. Namun dalam hal kolaborasi juga memiliki sisi negatif masalah komitmen karena terbukti masing-masing instansi masih menggunakan ego sektoral disetiap antar *stakeholders*.

Sehingga, bisa dikatakan dalam program kolaborasi Gandeng Gendong Kota Yogyakarta masing-masing pihak memiliki komitmen bersama dengan secara sadar bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya serta mewujudkan mimpi bersama. Tetapi untuk dalam proses berkolaborasi secara bersama antar *stakeholders* belum bisa dikatakan secara baik masih ukuran sedang. Kolaborasi yang dilakukan belum secara menyeluruh dalam artian kolaborasi berdampak baik ke publik maupun ke sesama para pihak *stakeholders*. Sementara yang terjadi sekarang baru sebatas menguntungkan instansi masing-masing barangkali efek dari kurangnya pertemuan yang dilakukan antar *stakeholders* terkait program Gandeng Gendong. Hal tersebut diakui oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMPPA Kota Yogyakarta Ibu Retnanigtyas, SSTP, MIP, bahwa untuk yang mengkoordinir pertemuan semua *stakeholders* dilakukan oleh pihak Bappeda, sementara kewenangan Dinas PMPPA hanya fokus pada kegiatan, (wawancara pada tanggal 23 agustus 2019).

Komitmen bersama yang dilakukan oleh pihak korporasi dengan bentuk pelaksanaan program melalui pemberdayaan lingkungan melalui *Corporate Social Responsibility* sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan keberadaan perusahaan tersebut. Sebagaimana yang di amanatkan oleh Perwali



tahun 2018 tentang program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta yaitu fungsinya kerjasama dengan usaha mikro kecil, pemberdayaan dan peningkatan ekonomi. Kehadiran perusahaan mensupport segala bentuk program yang dibuat oleh pemerintah baik itu mengenai pemberdayaan, peningkatan kualitas ekonomi masyarakat. Selanjutnya setiap perusahaan diharuskan menggunakan serta mendahulukan tenaga lokal setiap dalam usaha maupun kegiatan lainnya yang sesuai kriterianya.

Perusahaan yang ada dilingkungan Pemerintahan Kota Yogyakarta diharuskan menggunakan setiap produk usaha masyarakat mikro dan usaha kecil lokal. Ikut mempromosikan serta memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat dan memberikan *support* terhadap pembinaan, pelatihan mutu produk yang sesuai standar konsumen. Perusahaan memberikan dana tanggungjawab sosial dan lingkungan, fungsinya meningkatkan tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan diwilayahnya. Dalam keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 531 Tahun 2018 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Masa Bakti 2018-2020. Bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perlu bersinergi dengan program pemerintah daerah agar pemerataan pembangunan ekonomi masyarakat dapat terwujud.

Tugas anggota forum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yaitu merumuskan program, pola tindak dan model kerjasama kemitraan dalam pelaksanaannya. Memberikan edukasi, sosialisasi, memfasilitasi perusahaan untuk merealisasikan dan juga ikut dalam melaksanakan, kemudian mendata, mencatat, mendokumentasi juga mempublikasikan seluruh kegiatan yang telah dilakukan.

Forum tersebut juga melakukan mediasi yang diperlukan perusahaan dalam implikasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di wilayah pemerintahan Kota Yogyakarta.

Selanjutnya membangun komitmen bersama atau hubungan yang harmonis dalam jaringan kerjasama antar semua potensi kesejahteraan sosial (masyarakat, lintas sektor dan dunia usaha). Forum tersebut menyusun dokumen perencanaan program dan kegiatan perusahaan serta melaksanakan kegiatan sesuai apa yang ditetapkan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi terhadap pelaksanaan TSLP. Korporasi sebagai bagian dari lima *stakeholder collaborative governance* program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta ikut terlibat memberdayakan baik dari sisi SDM (*soft skill* dan *hard skill*) masyarakat dan membantu secara ekonomi lewat program CSR.

### **5.3.1. Program CSR (*Corporate Social Responsibility*)**

Program CSR (*corporate social responsibility*) dari sejumlah perusahaan yang ada di Kota Yogyakarta sebelum kehadiran program Gandeng Gendong belum di arahkan dengan baik tentang mekanisme penyaluran bantuan berupa CSR ke masyarakat. Setiap perusahaan yang menyalurkan program CSRnya hanya dituntut oleh pemerintah Kota Yogyakarta memberikan bantuannya secara cuma-cuma belum di atur sedemikian rupa seperti sekarang. Namun setelah hadirnya program Gandeng Gendong perusahaan yang ada di Kota Yogyakarta diharuskan tidak hanya sebatas menyalurkan bantuan CSR berupa bantuan uang tunai tapi ikut memberdayakan *soft skill* dan *hard skill* masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi dan SDM.

Dalam upaya memudahkan pelaksanaan program CSR (*corporate social responsibility*), maka pihak korporasi se Kota Yogyakarta memiliki kewenangan untuk menyalurkan bantuan tersebut, membagi kewenangan wakil ketua menjadi empat berikut tabelnya;

Tabel 5.3 Tugas Wakil Ketua Program CSR (*Corporate Social Responsibility*)

Wakil Ketua I	Wakil Ketua II	Wakil Ketua III	Wakil Ketua IV
1. Inkubasi bisnis	1. Beasiswa	1. Perluasan	1. Kolaborasi Hotel
2. BPJS	<i>capacity building</i>	forum CSR	& LPPM kampung
ketenagakerjaan	2. BPJS Guru	2. Jaminan	wisata
UKM	Paud	kesehatan	2. Pelatihan Kue
3. Pelatihan	3. RTH	3. Sanitasi	3. Pengelolaan plastik
<i>housekeeping</i>	4. Ketrampilan	4. <i>Stunting</i>	warmindo
4. Pelatihan <i>engineer</i>	masyarakat		4. Kolaborasi dengan
5. RTLH	UMKM		forum LPPM
6. Pesantren &			kampung wisata
Sekolah Rohani			

Sumber : Dokumentasi Bappeda Kota Yogyakarta, 2018

Wakil ketua 1. inkubasi bisnis, BPJS ketenagakerjaan, UKM pelatihan *housekeeping*, pelatihan *engineer*, RTLH (rumah tidak layak huni), pesantren dan sekolah rohani, wakil ketua 2. beasiswa *capacity building*, BPJS Guru Paud, RTH, ketrampilan masyarakat UMKM. Wakil ketua 3, perluasan forum CSR , jaminan kesehatan, sanitasi, *stunting* dan wakil ketua 4, kolaborasi Hotel dan LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat), kampung wisata, pelatihan kue, pengelolaan plastik warmindo, kolaborasi dengan forum LPPM kampung wisata.

Pelatihan yang dilakukan oleh Korporasi untuk meningkatkan agar kualitas SDM yang dimiliki masyarakat mampu menjawab tantangan yang tengah di hadapi Kota Yogyakarta sebagai tempat pariwisata. Upaya penataan dan penanganan yang dilakukan terhadap rumah tidak layak huni (RTLH) sebagai bagian dari satu kesatuan program Gandeng Gendong. Dalam bidang pendidikan

yang ditetapkan sebagai prioritas utama yang menjadi perhatian adalah pemberian bantuan kepada keluarga yang tidak mampu non KMS (kartu menuju sejahtera) dalam bentuk beasiswa. Kemudian bantuan CSR dalam bentuk BPJS diberikan kepada guru PAUD, membangun fasilitas olahraga dan ruang terbuka hijau publik (RTH).

Perbaikan sanitasi masyarakat dan penanganan balita, dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta dan *stakeholder* yang lain adalah upaya menurunkan angka ketimpangan paling tinggi, pendapatan menengah atas dan menengah bawah semakin tahun semakin melebar. Pihak Korporasi juga selain rutin melakukan kegiatan program yang telah ditetapkan juga melakukan kerjasama antar *stakeholder* yang lain. Berikut gambar 5.8 beberapa dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak Korporasi yang bekerja sama dengan berbagai *stakeholders*. Kegiatannya dimulai dari mapping masalah atau rapat dengar pendapat, melakukan sosialisasi, mengadakan pelatihan dan mengkurasi sejumlah produk yang dihasilkan oleh UMKM.

#### **5.3.1.1. Program CSR (*Corporate Social Responsibility*) Wakil Ketua I**

Program CSR (*corporate social responsibility*) Wakil Ketua I mengusung 6 program kerja yaitu inkubasi bisnis, BPJS ketenagakerjaan UKM, pelatihan *housekeeping*, pelatihan *engineer*, RTLH, pesantren dan sekolah rohani yang dikoordinir tiga bidang yaitu bidang ekonomi, bidang sosial dan bidang keagamaan, masing-masing memiliki perhatian tersendiri. Progres pelaksanaan Bank BPD DIY memiliki 5 sektor yaitu ekonomi, fisik, kesehatan dan sosial selanjutnya progres pelaksanaan Bank juga memiliki 5 sektor. Kemudian kegiatan

belum terlaksana, inkubasi bisnis, BPJS ketenagakerjaan UKM, pelatihan *housekeeping*, pelatihan *engineering*, pesantren dan sekolah rohani.

Tabel 5.5 Program CSR (*Corporate Social Responsibility*) Wakil Ketua I

Bidang	Program	Progres Kegiatan	Belum Terlaksana
1. Bidang Ekonomi 2. Bidang Sosial 3. Bidang Keagamaan	Program Diusung: 1. Inkubasi bisnis 2. BPJS ketenagakerjaan UKM 3. Pelatihan <i>housekeeping</i> 4. Pelatihan <i>engineer</i> 5. RTLH 6. Pesantren & Sekolah Rohani	Progres Pelaksanaan Bank BPD DIY: 1. Sektor Ekonomi: UMKM (pelatihan pembuatan sandal, rajut, memasak, rajut tas, sulam pita, dll), Kue Kering 2. Sektor Fisik: RTLH 3. Sektor Sosial: Kampung Ramah Anak 4. Sektor Pendidikan: Sarpras Sekolah 5. Sektor Kesehatan: Sarpras Posyandu, Sosialisasi Progres Pelaksanaan Bank Jogja: 1. Sektor Ekonomi: UMKM (pelatihan kuliner), Kue Kering 2. Sektor Fisik : RTLH 3. Sektor Sosial: Kampung Ramah Anak 4. Sektor Pendidikan: Sarpras Sekolah 5. Sektor Kesehatan: Sarpras Posyandu, Pelatihan membuat makanan kesehatan	Kegiatan belum terlaksana: 1. Inkubasi bisnis 2. BPJS ketenagakerjaan UKM 3. Pelatihan <i>housekeeping</i> 4. Pelatihan <i>engineering</i> 5. Pesantren & Sekolah Rohani

Sumber : Dokumentasi Bappeda Kota Yogyakarta, 2018

### 5.3.1.2. Program CSR (*Corporate Social Responsibility*) Wakil Ketua II

Program CSR (*corporate social responsibility*) Wakil Ketua II mengungkap 4 program kerja yaitu beasiswa *capacity building*, BPJS Guru Paud, RTH, ketrampilan masyarakat UMKM. Program tersebut dikoordinir oleh tiga bidang yaitu bidang pendidikan, bidang olahraga dan bidang penguatan dan pemberdayaan SDM, untuk laporan sementara telah dilakukan oleh Bank BPD DIY dan Bank Jogja dan progres pelaksanaan yang sudah terlaksana ketrampilan masyarakat UMKM.

Tabel 5.6 Program CSR (*Corporate Social Responsibility*) Wakil Ketua II

Bidang	Program	Progres Kegiatan	Belum Terlaksana
1. Bidang Pendidikan 2. Bidang Olahraga 3. Bidang Penguatan & Pemberdayaan SDM	Program Diusung: 1. Beasiswa <i>capacity building</i> 2. BPJS Guru Paud 3. RTH 4. Ketrampilan Masyarakat UMKM	Telah dilakukan oleh Bank BPD DIY dan Bank Jogja	Progress Pelaksanaan: Yang sudah terlaksana Ketrampilan Masyarakat UMKM

Sumber : Dokumentasi Bappeda Kota Yogyakarta, 2018

### 5.3.1.3. Program CSR (*Corporate Social Responsibility*) Wakil Ketua III

Program CSR (*corporate social responsibility*) Wakil Ketua III mengusung 4 program kerja yaitu perluasan forum CSR, jaminan kesehatan, sanitasi dan *stunting*, program ini dikoordinir oleh dua bidang yaitu bidang kelembagaan dan bidang kesehatan. Program CSR oleh Wakil Ketua III untuk kegiatan yang belum terlaksana yaitu progres perluasan forum CSR pasca pertemuan di Hotel Forriz.

Tabel 5.7 Program CSR (*Corporate Social Responsibility*) Wakil Ketua III

Bidang	Program	Kegiatan Belum Terlaksana
1. Bidang Kelembagaan 2. Bidang Kesehatan	Program Diusung: 1. Perluasan Forum CSR 2. Jaminan Kesehatan 3. Sanitasi 4. <i>Stunting</i>	Kegiatan Belum Terlaksana ; Progress Perluasan Forum CSR ( <i>Corporate Social Responsibility</i> ) Pasca Peretemuan di Hotel Forriz

Sumber : Dokumentasi Bappeda Kota Yogyakarta, 2018

### 5.3.1.4. Program CSR (*Corporate Social Responsibility*) Wakil Ketua IV

Program CSR (*corporate social responsibility*) Wakil Ketua III mengusung 4 program kerja yaitu kolaborasi Hotel dan LPPM Kampung Wisata, pelatihan kue, pengelolaan plastik warmindo dan kolaborasi dengan forum LPPM Kampung Wisata. Program tersebut dikoordinir oleh tiga bidang yaitu bidang pariwisata, seni dan budaya, bidang lingkungan hidup dan bidang riset dan teknologi, untuk

laporan sementara telah dilakukan oleh Bank BPD DIY dan Bank Jogja progres pelaksanaan pelatihan kue.

Tabel 5.8 Program CSR (*corporate social responsibility*) Wakil Ketua IV

Bidang	Program	Progres
1. Bidang Pariwisata, Seni, Budaya	1. Kolaborasi hotel & LPPM Kampung Wisata	Pelatihan Kue telah dilakukan oleh Bank BPD DIY dan Bank Jogja
2. Bidang Lingkungan Hidup	2. Pelatihan Kue	
3. Bidang Riset & Teknologi	3. Pengelolaan plastik warnindo	
	4. Kolaborasi dengan Forum LPPM Kampung Wisata	

Sumber : Dokumentasi Bappeda Kota Yogyakarta, 2018

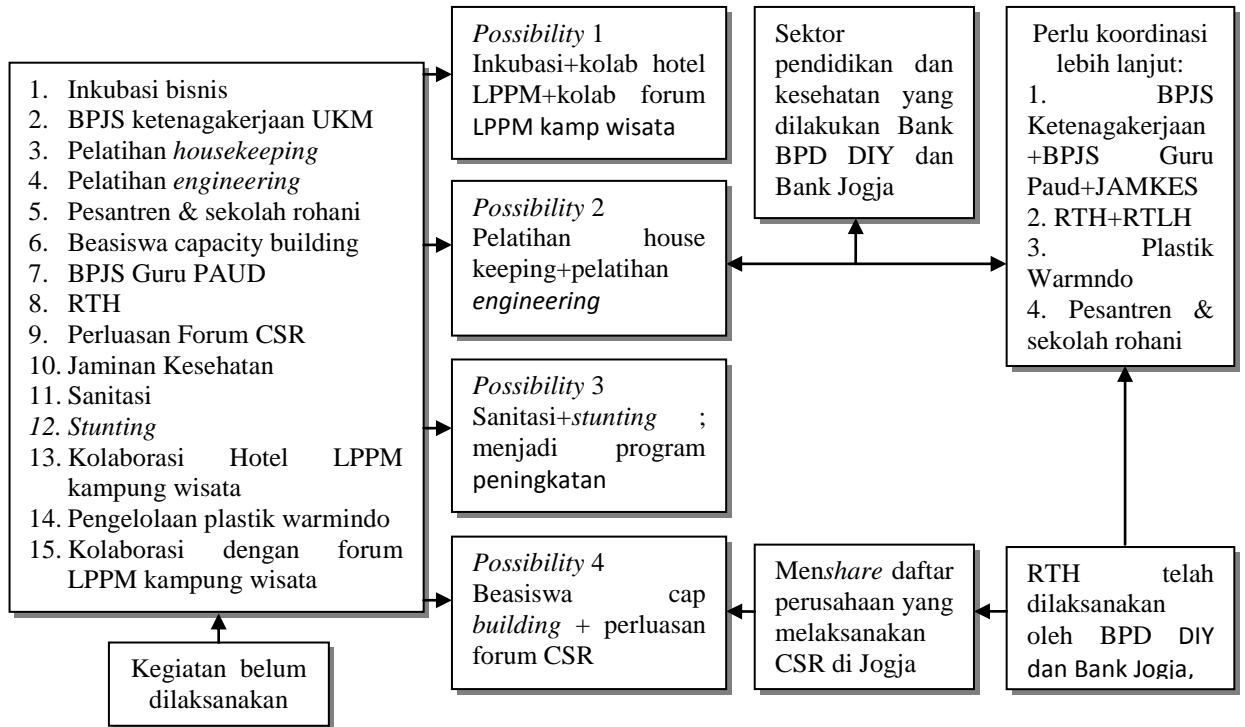
Terakhir program yang dilakukan Korporasi yaitu mengkurasi setiap produk-produk yang dihasilkan UKM (usaha kecil mikro) program Gandeng Gandong. Baik dari pihak swasta atau Hotel (*chef* atau Koki Hotel) melakukan kurasi (penilaian terhadap produk yang dihasilkan kelompok bidang kuliner program Gandeng Gandong atau pelaku UKM di Kota Yogyakarta). Setiap produk yang dihasil dari pemberdayaan *collaborative governance* di kurasi untuk memberikan koreksi dan masukan kepada pelaku UKM agar rodud kuliner yang dihasilkan berkualitas. Tujuan kurasi selain meningkatkan kualitas juga untuk memenuhi standar yang berlaku baik di hotel dan toko modern yang ada di Kota Yogyakarta. Salah satu kriteria standar yang harus dipenuhi oleh pelaku UKM yaitu produknya harus variatif dan menarik bentuk, rasa, disisi harga harus sesuai.

### 5.3.1.5. Program Kerja Yang Belum Terlaksana

Forum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan masa bakti 2018 hingga 2020 telah melaksanakan program kerjanya terhitung dari 10 april 2018 hingga 2019. Program CSR (*corporate social responsibility*) yang dilakukan oleh empat Wakil Ketua, yang terdiri dari sepuluh komisi bidang masih terdapat sisi

kekurangan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan. Berikut alur program yang belum terlaksana;

Bagan 5.2  
Alur Program Yang Belum Terlaksana



Tabel 5.7 Nama Perusahaan yang Hadir

No	Nama Perusahaan	No	Nama Perusahaan
1	Grand Inna Malioboro	13	Bakpia 25
2	Grand Neo Malioboro	14	Gardena
3	Abadi Hotel Jogja	15	BPD DIY Cab. Senopati Yk
4	Hotel Mataram Malioboro	16	Bank Jogja
5	Hotel Royal Darmo Malioboro	17	PT. Indomarco Prismatama
6	Prima Inn Hotel Malioboro	18	PT. Sari Husada
7	Waroeng Group Jogja	19	PT. Sari Husada
8	K24	20	PT. Astra Inernasional tbk Daihatsu
9	Mirota Group	21	Westlake Resto
10	Kantor Cabang Bank Mandiri Yogyakarta	22	PT. Angkasa Pura I
11	Bank BNI KCU Yogyakarta	23	PKPU Human Initiative
12	RS. Batesdha	24	Kresna TV

Sumber : Data yang diolah oleh Peneliti dari Bappeda Kota Yogyakarta, 2018



Berdasarkan tabel diatas bahwa untuk sementara perusahaan yang telah hadir dan ikut berpartisipasi dalam program Gandeng Gendong ada dua puluh empat perusahaan. Forum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan masa bakti 2018-2020, bahwa sesuai dengan prinsip pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Perlu disinergikan dengan program pembangunan daerah agar pemerataan pembangunan ekonomi masyarakat di Kota Yogyakarta dapat terwujud. Program CSR dalam pelaksanaannya memang diakui oleh pihak korporasi masih banyak yang belum terlaksana sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Bagus Wicaksono bagian Penyelia Unit Operasional Bank Pembangunan Daerah Cabang Senopati Yogyakarta menyatakan bahwa;

“..Peran kami dari pihak Swasta mengembangkan UMKM dengan program CSR bantuan yang berkelanjutan, yang kami lakukan missalnya program Gandeng Gendong yang dipelopori oleh Pemerintah Kota Yogyakarta memberi bimbingan pelatihan dan pemberdayaan walaupun kurang rutin kami lakukan itu, namun usaha yang kami lakukan itu berbarengan dengan Pemkot Yogyakarta sebagai pilot proyek atau pelaksana, salah dua program yang kami lakukan yaitu memberi bantuan kepada masyarakat baik itu berbentuk uang, pelatihan dan pemberdayaan dan masalah kuliner setiap melakukan kegiatan acara kami selalu mengorder makanan dengan kelompok Gandeng Gendong, tantangan program ini kami tidak menemukan kesulitan dan harapan kami terhadap program ini semoga program pemerintah kota ini lebih menjangkau ke skup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Wawancara tanggal 17 September 2019 Jam 09.39 Wib).

Korporasi dalam melaksanakan program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta dalam bentuk CSR tidak hanya memberikan bantuan pelatihan dan mempromosi produk-produk yang dihasilkan oleh UKM masyarakat. Namun ikut terlibat dalam mengembangkan produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat agar memiliki daya saing dan berkualitas. Korporasi juga memberikan bantuan berbentuk financial dan ikut menjadi konsumen terhadap produk-produk UKM

yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Yogyakarta. Namun dalam pelaksanaan program yang dilakukan oleh pihak korporasi juga memiliki sejumlah problem di antaranya, masih belum maksimal dalam pemberdayaan dan pelatihan. Masyarakat yang ingin memasarkan produk-produk yang dihasilkan dari UKM ke Hotel yang ada di Kota Yogyakarta mengalami kesulitan karena sejumlah SOP yang terlalu ribet dan tidak fleksibel.

Hal senada juga diakui oleh Ibu Sri Nuryanti Ketua Kelompok Gandeng Gandong dari Rejowinangun Kota Gede 1/370 RT 20 RW 06 menyebutkan bahwa;

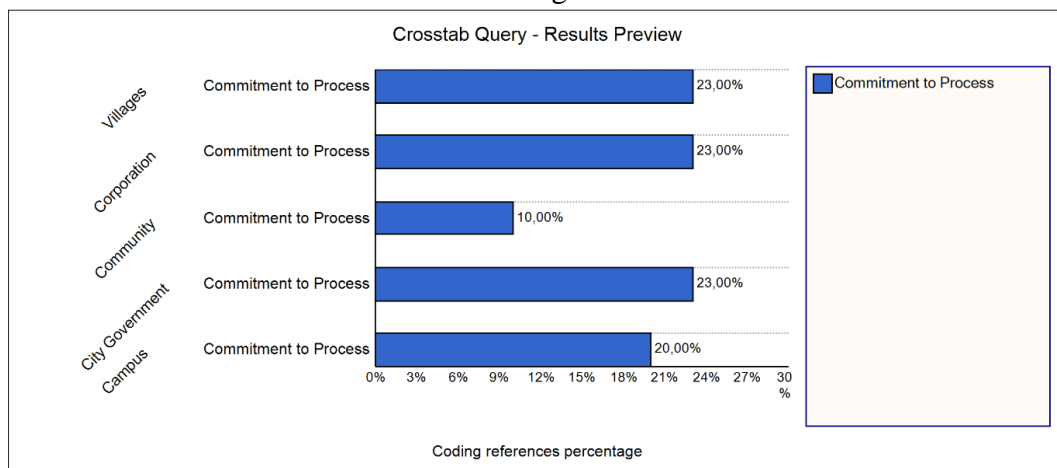
Program Gandeng Gandong telah banyak memberi manfaat terhadap kami UMKM lewat pelatihan, pemberdayaan dan meningkatnya pendapatan secara ekonomi, namun masih ada kendala kurang pemberdayaan dari CSR tantangan kami kesulitan melayani banyaknya order sehingga banyak juga yang kami tolak (tidak menerima pesanan) harapannya semoga tingkat kemiskinan di Kota Yogyakarta berkurang (Wawancara tanggal 03 September 2019 Jam 16.00 Wib).

Dari hasil wawancara kedua informan di atas bahwa pelaksanaan program Gandeng Gandong yang dilakukan oleh pihak swasta atau korporasi mengalami berbagai dinamika kelebihan dan kekurangan. Sebagaimana yang telah dikonfirmasi oleh pihak *stakeholder* dari korporasi bahwa dalam pelaksanaannya diakui belum maksimal dari perencanaan yang telah ditetapkan oleh instansinya. Pemberdayaan dan pelatihan yang dilakukan oleh pihak korporasi diakui kendala salah satunya adalah masih menunggu komando dari pihak pemerintah Kota Yogyakarta. Akhirnya dalam pelaksanaan program Gandeng Gandong terkesan saling tunggu menunggu antar *stakeholder*, maka berefek terhadap memburuknya pelaksanaan program. Memburuknya pelaksanaan program tersebut dikonfirmasi

langsung dari kelompok yang tergabung dalam program bahwa kehadiran program tersebut diakui baik namun belum maksimal dampak kemasyarakat.

*Collaborative governance* dalam program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh lima *stakeholders* (Pemerintah Kota, Korporasi, Kampus, Komunitas dan Kampung) dengan *Commitment to Process* sebagai berikut;

Gambar 5.5  
*Collaborative Governance* dengan *Commitment to Process*



Sumber : Data diaolah dengan Nvivo 12 Plus, 2019

Dalam komitmen bersama (*commitment to process*) *collaborative governance* yang dilakukan oleh lima *stakeholders* (Pemerintah Kota, Korporasi, Kampus, Komunitas dan Kampung) dalam program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta yang dominan yaitu Pemerintah Kota 23,00%, Korporasi 23,00% dan Kampung 23,00%. Kemudian menyusul Kampus 20,00% dan terakhir dari pihak Komunitas 10,00% yang paling rendah dalam *commitment to process* partisipasinya dalam program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta.

#### **5.2.4. Share Understanding (Pemahaman Bersama)**

*Share understanding* yang dimaksud dalam *collaborative governance* yaitu usaha menyelaraskan pemahaman bersama atau persepsi dalam hal tujuan yang akan dicapai secara *collaborative*. Hal demikian yang dimaksud bahwa *share understanding* adalah kesepakatan tentang pengetahuan yang relevan dengan masalah. Pemahaman bersama yang telah dilakukan oleh lima *stakeholders* (Pemerintah Kota, Swasta, Kampus, Komunitas dan Kampung) dalam program Gandeng Gendong bahwa *share understanding* yang dilakukan dengan proses *hearing* (mendengar langsung apa yang menjadi problem masyarakat).

Upaya peningkatan kesejahteraan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta sebagai pelaku utama dari program Gandeng Gendong dengan meningkatkan *soft skill* dan *hard skill* masyarakat. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengembangkan bidang usaha mikro dan kecil, memberi pelatihan, pendampingan dalam hal produksi, pemasaran dan manajemen terhadap usaha mikro dan kecil. Para *stakeholders* mengadakan *money* (*monitoring* dan evaluasi) terhadap apa yang diproduksi oleh masyarakat dan melakukan studi potensi lokal. Selanjutnya para *stakeholders* (Pemerintah Kota, Korporasi, Kampus dan Komunitas) menyediakan fasilitas kebutuhan pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

Kemudian dalam proses pembangunan peran kampus sangat dibutuhkan dalam sumbangan pemikiran demi terciptanya pembangunan yang merata dan adil terhadap masyarakat. Kampus sebagai bagian dari kelompok *civil society* ikut berperan penting dalam *mensupport* setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh

pemerintah Kota Yogyakarta. Peran dari salah satu dari *stakeholder* yaitu kampus melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam memberdayakan masyarakat Kota Yogyakarta. Maka terbentuk lah forum LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) dengan adanya forum ini bisa bersinergi dengan antar kampus di Kota Yogyakarta yang sebelumnya berjalan sendirian dalam peran sebagai bagian membangun Kota Yogyakarta. Forum tersebut melakukan berbagai kegiatan dalam bentuk tindakan nyata dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi dilakukan dengan dua bentuk, pertama didanai oleh perguruan tinggi sendiri kedua melalui bantuan pendanaan dari pihak pemerintah dengan skema yang sudah ditentukan sesuai kebutuhan pemerintah daerah.

Forum LPPM Kota Yogyakarta sebagai bentuk wadah persatuan perguruan tinggi se Kota Yogyakarta supaya lebih mudah dalam bentuk sumbangan pemikiran dan melalui peran lainnya terhadap pembangunan. Selama ini perguruan tinggi di Kota Yogyakarta dalam melakukan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu dalam bentuk KKN sering dilakukan diluar Kota Yogyakarta. Namun setelah terbentuknya forum LPPM wadah persatuan perguruan tinggi ini semua kegiatan kampus diharapkan memprioritaskan pengabdian terhadap Kota Yogyakarta terdahulu.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bapak Dr Ima Ismara sebagai perwakilan dari pihak Kampus Universitas Negeri Yogyakarta sebagai berikut;

“..Kami dari pihak kampus se Kota Yogyakarta memberi pendampingan produksi, peningkatan SDM masyarakat, melakukan studi potensi lokal dan dari kampus juga melakukan riset penelitian, pengabdian, pengembangan dan pembuatan alat produksi karena jika alat dibeli lewat pihak lain maka terlalu mahal, setiap kampus

se Kota Yogyakarta semaksimal mungkin memberi manfaat yang besar terhadap lingkungan kampus, dari pihak kampus tidak mengalami tantangan dan harapan kedepan program ini bisa lebih mengurangi angka kemiskinan sehingga tidak ada lagi kesenjangan yang sangat tajam antara miskin dan kaya (Wawancara tanggal 05 September 2019 Jam 08.55 Wib).

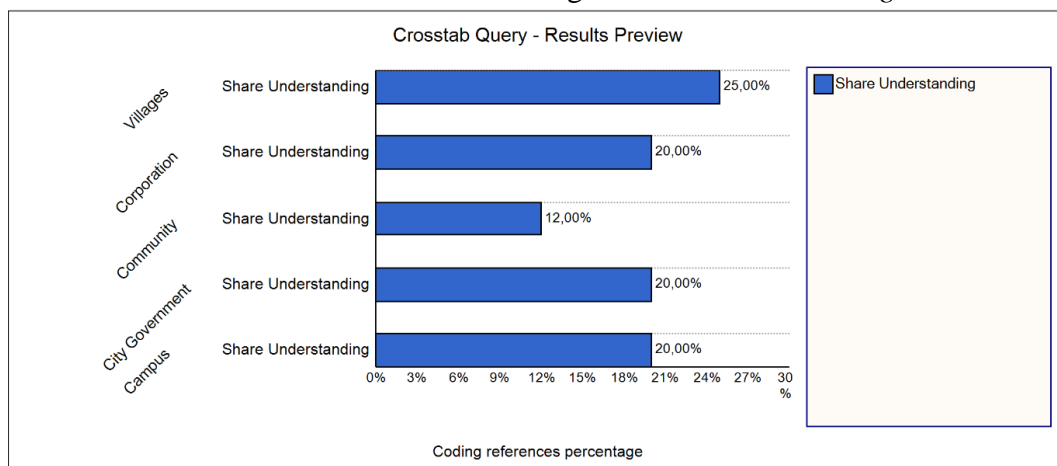
Hal tersebut sebagaimana diakui oleh Komisi Bidang Penguatan dan Pemberdayaan SDM oleh Bapak Dr. Ima Ismara dari kampus UNY, bahwa tugasnya melakukan riset dan mendengar problem yang terjadi di masyarakat dan membantu pembuatan alat produksi. Dalam proses *hearing* tersebut memang belum sepenuhnya maksimal, barangkali harus di akui program ini belum begitu lama jalannya baru masuk dua tahun. Cara berpikir dari para *stakeholders* seharusnya memang memiliki pemahaman bersama terhadap program Gandeng Gendong namun pemikiran itu tidak berjalan semestinya.

Sudah 20 kampus yang ikut bersinergi dengan pemerintah Kota Yogyakarta dalam mendukung berbagai agenda penelitian dan kegiatan pemerintah lainnya, pada tahun 2019 pemerintah Kota Yogyakarta menganggarkan Rp 200 juta untuk agenda penelitian oleh dosen melalui tim jaringan penelitian Kota Yogyakarta. Pihak Bappeda juga mengalokasikan anggaran Rp 150 juta untuk program pendampingan pengabdian masyarakat kuliah kerja nyata (KKN) dan kemitraan penelitian. Bappeda Kota Yogyakarta telah menginventarisasi beberapa kegiatan organisasi perangkat daerah yang membutuhkan kemitraan dengan perguruan tinggi di antaranya tentang penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran untuk pemetaan potensi kesiap-siagaan bahaya kebakaran, workshop karya ilmiah, assessment anak berkebutuhan khusus, dan pembinaan regulasi dan sertifikasi di bidang kesehatan.

Pada tahun 2018, pemerintah kota Yogyakarta bekerja sama dengan pihak kampus Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) dalam peningkatan keterampilan dan kewirausahaan melalui pelatihan membuat menggunakan pewarna alami bagi masyarakat di kawasan Embung Lagensari. Pada tahun 2019, melakukan enam agenda penelitian dengan bekerja sama beberapa kampus dalam penerapan lot pada aplikasi sistem parkir cerdas berbasis mobile dengan IST Akprind dan melakukan penelitian pengembangan Taman Pintar Yogyakarta menjadi objek wisata Go Digital dengan aplikasi Mathcitymap. LPPM juga melakukan agenda penelitian tidak hanya di Kota Yogyakarta tapi kegiatan penelitian diluar DIY dan bahkan hingga luar Jawa.

Dalam program penanggulangan kemiskinan dengan program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta dari pihak *stakeholders* yang berkolaborasi memiliki *share understanding* sebagai berikut;

Gambar 5.6  
*Collaborative Governance dengan Share Understanding*



Sumber : Data diaolah dengan Nvivo 12 Plus, 2019

Gambar 5.6 yang dilakukan oleh lima *stakeholders* (Pemerintah Kota, Korporasi, Kampus, Komunitas dan Kampung) bahwa yang paling dominan

dalam *share understanding* yaitu Kampung 25,00%. Kemudian menyusul Pemerintah Kota 20,00%, Korporasi 20,00%, Kampus 20,00% dan terakhir dari pihak Komunitas 12,00%.

#### **5.2.5. *Intermediate Outcomes* (Hasil Sementara)**

Berbagai hasil studi menunjukkan bahwa kolaborasi lebih mungkin terjadi apabila tingkat kolaborasinya relatif konkret artinya tujuan dan keuntungan benar-benar dilakukan bersama. Dalam proses *intermediate outcomes* diartikan sebagai hasil dari proses yang penting untuk membangun momentum yang dapat menyebabkan keberhasilan kolaborasi. Bisa memberikan *feedback* berkat keberhasilan dari proses kolaborasi dan mendorong terciptanya siklus yang lebih baik dalam membangun kepercayaan serta komitmen. Dalam program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh lima *stakeholders* (Pemerintah Kota, Swasta, Kampus, Komunitas dan Kampung) telah banyak memperoleh keberhasilan dari program *collaborative governance* tersebut.

Keberhasilan program Gandeng Gendong bisa dilihat dari sejak diluncurkan program ini pada tanggal 10 april 2018 ke masyarakat Kota Yogyakarta yang visi dan misinya ingin menurunkan angka kemiskinan lewat kolaborasi. Hal tersebut di akui oleh beberapa kelompok program Gandeng Gendong, pertama dari Ibu Fitri Sulistyowati Kecamatan Danurejan, bahwa perekonomiannya membaik sejak hadir dan bergabungnya dia dengan program Gandeng Gendong. Program Gandeng Gendong ini juga memfasilitasi *market place* yang jelas bagi warga Kota Yogyakarta misalnya; menyuplai Nasi Kotak dan *Snack* ke OPD Kota



Yogyakarta dan OPD DIY juga ke alun-alun atau ke tempat wisata lainnya, (wawancara pada tanggal 26 agustus 2019).

Hal serupa juga di akui oleh Ibu Sri Nuryanti bahwa perekonomiannya membaik sejak bergabung dengan program Gandeng Gendong, karena *soft skill* dan *hard skiil* masyarakat yang tergabung dengan program tersebut difasilitasi dengan baik. *Soft skill* yaitu mengenai sosialisasi, pemberdayaan dan pelatihan dari program Gandeng Gendong secara teoritis diberi pemahaman mengenai bagaimana produksi dan memasarkan produk. *Hard skill* yaitu pelatihan secara langsung oleh pihak swasta atau hotel yang ada di Kota Yogyakarta, dan di kurasi (penilaian secara teknis) tentang SOP (*standard operational procedural*) produk yang dipasarkan ke hotel maupun ke masyarakat umum, (wawancara pada tanggal 03 september 2019).

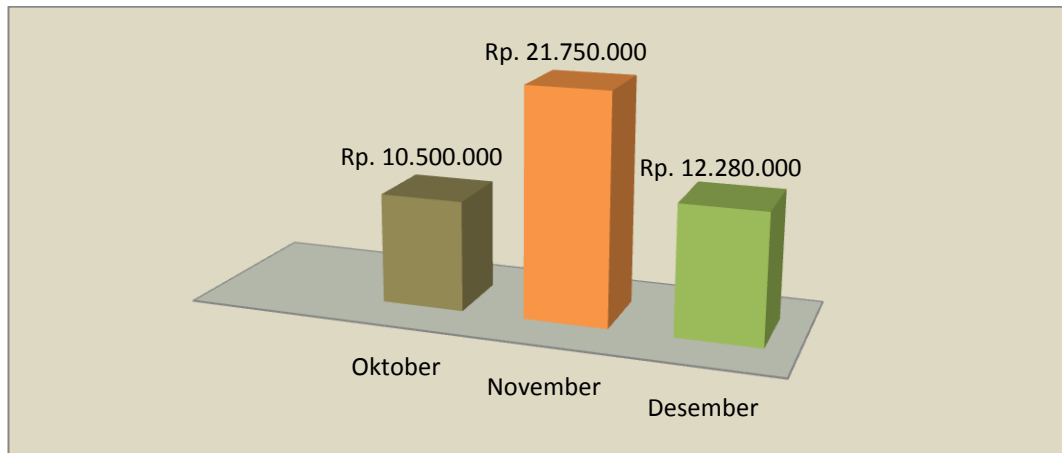
Sehubungan dengan hal tersebut juga diakui pernyataan yang sama oleh Ibu Asri Mikatsih Ketua Kelompok Pakuncen Kecamatan Wirobrajan, bahwa sejak bergabung dengan program Gandeng Gendong yang bagian Kuliner, perekonomiannya sangat meningkat dari sebelumnya. Keunggulan program ini menyediakan *market place* dan aplikasi Nglarisi di JSS (*Jogja Smart Service*) bagi ibu-ibu rumah tangga yang berpenghasilan rendah dan tidak memiliki penghasilan yang tetap, (wawancara tanggal 04 september 2019).

Program *collaborative governance* yang dilakukan oleh lima *stakeholder* sedikit banyak telah membantu masyarakat Kota Yogyakarta keluar dari tingkat kesenjangan perekonomian. Pemerintah Kota Yogyakarta telah berhasil membuat terobosan sebuah kebijakan baru terhadap sejumlah permasalahan kemiskinan

yang ada dan dengan tanggap menyikapinya dengan berkolaborasi berbagai unsur *stakeholder*. Keberhasilan program Gandeng Gendong sangat signifikan berdampak ke pelaku UKM dan pelaku industri lainnya, berikut pertumbuhan omset dari salah satu kelompok kuliner sebagai berikut:

Grafik 5.1

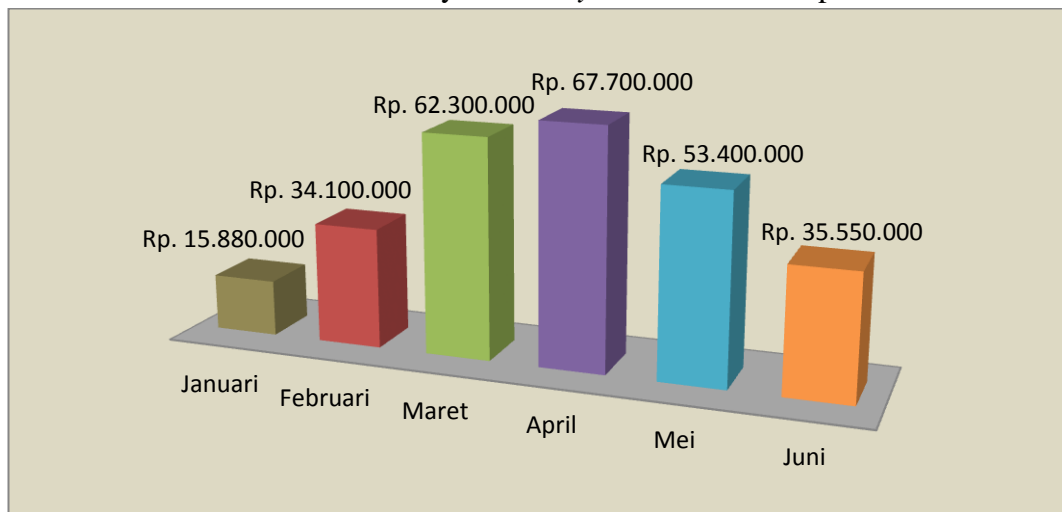
Pertumbuhan Omset Pakudaya *Culinary* Oktober, November dan Desember 2018



Sumber : Data diolah Peneliti dari Kelompok Pakudaya Kel Pakuncen, 2019

Grafik 5.2

Pertumbuhan Omset Pakudaya *Culinary* dari Januari sampai Juni 2019



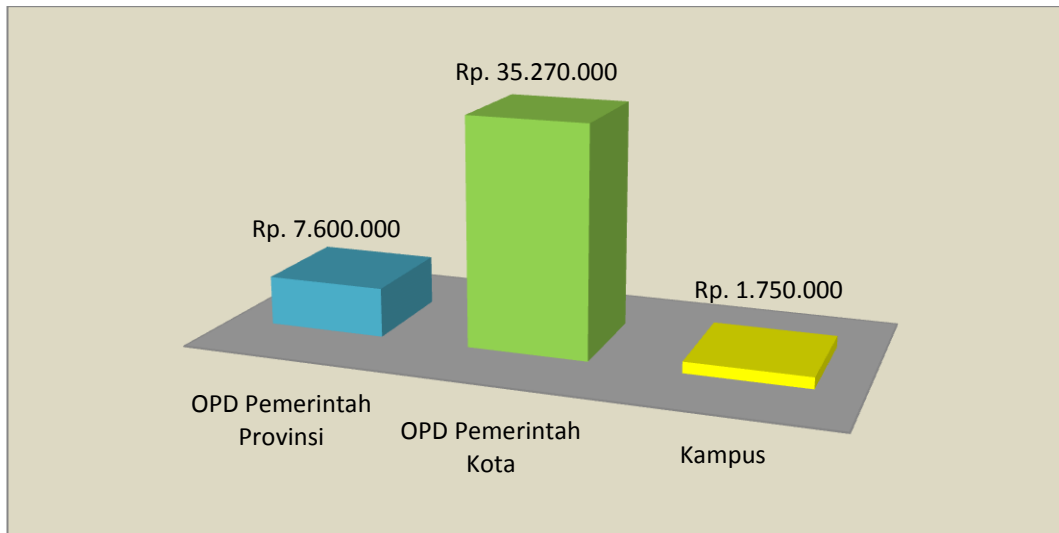
Sumber : Data diolah Peneliti dari Kelompok Pakudaya Kel Pakuncen, 2019

Grafik 2, di atas salah satu kelompok kuliner program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta mengalami peningkatan secara fluktuasi (naik turun) omset kelompok Pakudaya *Culinary*. Pada tahun 2018 pendapatan kelompok Pakudaya *Culinary* di bulan oktober berjumlah Rp. 10.500.000.00 kemudian meningkat menjadi dua kali pada bulan november berjumlah Rp. 21.750.000.00 sementara pada bulan desember terjadi penurunan secara signifikan pendapatan berjumlah Rp. 12.280.000.00. Pada tahun 2019 omset atau pendapatan kelompok Pakudaya *Culinary* mengalami fluktuasi seperti di tahun 2018, namun cukup signifikan pendapatan perbulan dari sebelumnya.

Pada bulan januari berjumlah Rp. 15.880.000.00 meningkat di bulan februari berjumlah Rp. 34.100.000.00 juga terjadi di bulan maret meningkat tajam berjumlah Rp. 62.300.000.00. Pada bulan april terus meningkat berjumlah Rp. 67.700.000.00 dan mulai pada bulan mei terjadi penurunan berjumlah Rp. 53.400.000.00 hingga di bulan juni secara signifikan terjadi penurunan omset atau pendapatan berjumlah Rp. 35.550.000.00. Kemudian omset kelompok Pakudaya *Culinary* program Gandeng Gendong berdasarkan wilayah konsumen yang menggunakan produk UKM terus mengalami peningkatan.

Pada tahun 2018 yang menggunakan produk kuliner program Gandeng Gendong kelompok Pakudaya *Culinary* tiga tempat yaitu OPD Pemerintah Provinsi DIY, OPD Pemerintah Kota Yogyakarta dan Kampus. Berdasarkan grafik 5.3 berikut ini jumlah konsumen yang paling dominan OPD Pemerintah Kota Yogyakarta berjumlah Rp. 35.270.000.00, OPD pemerintah Provinsi DIY berjumlah Rp. 7.600.000.00 dan terakhir Kampus berjumlah Rp. 1.750.000.00.

Grafik 5.3  
 Pertumbuhan Omset Pakudaya *Culinary* Tahun 2018



Sumber : Data diolah Peneliti dari Kelompok Pakudaya Kel Pakuncen, 2019

Grafik 5.4  
 Pertumbuhan Omset Pakudaya *Culinary* Tahun 2019



Sumber : Data diolah Peneliti dari Kelompok Pakudaya Kel Pakuncen, 2019

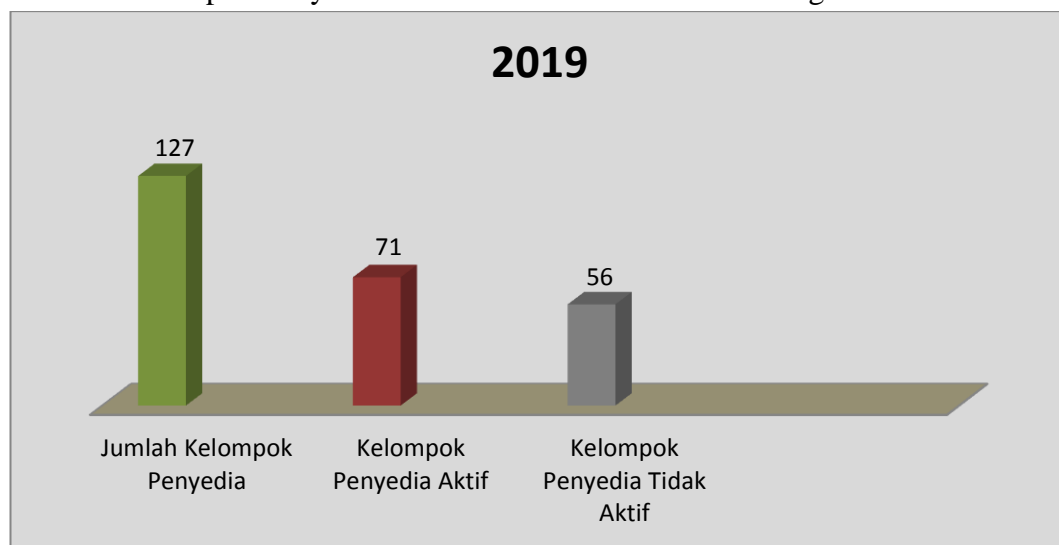
Pertumbuhan omset atau pendapatan kelompok kuliner program Gandeng Gandong Pakudaya *Culinary* pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2018 yaitu menjadi lima tempat. Pertama yang paling tinggi konsumennya masih dari OPD Pemerintah Kota Yogyakarta berjumlah Rp. 134.580.000.00 yang kedua

dari OPD Pemerintah Provinsi DIY berjumlah Rp. 51.150.000.00, dari Kecamatan dan Kelurahan berjumlah Rp. 48.850.000.00, dari pihak Kampus berjumlah Rp. 13.700.000.00, dan umum yang masih terendah yaitu berjumlah Rp. 11.300.000.000. Bukti pemerintah Kota Yogyakarta memang benar-benar berkomitmen secara serius bisa dilihat dengan presentasi konsumsi yang tertinggi dari grafik di atas baik di tahun 2018 hingga lebih meningkat di tahun 2019.

Berikut jumlah kelompok penyedia kuliner seluruhnya aktif tidak aktif dan jumlah transaksi hingga jumlah total penjualan grafik sebagai berikut:

Grafik 5.5

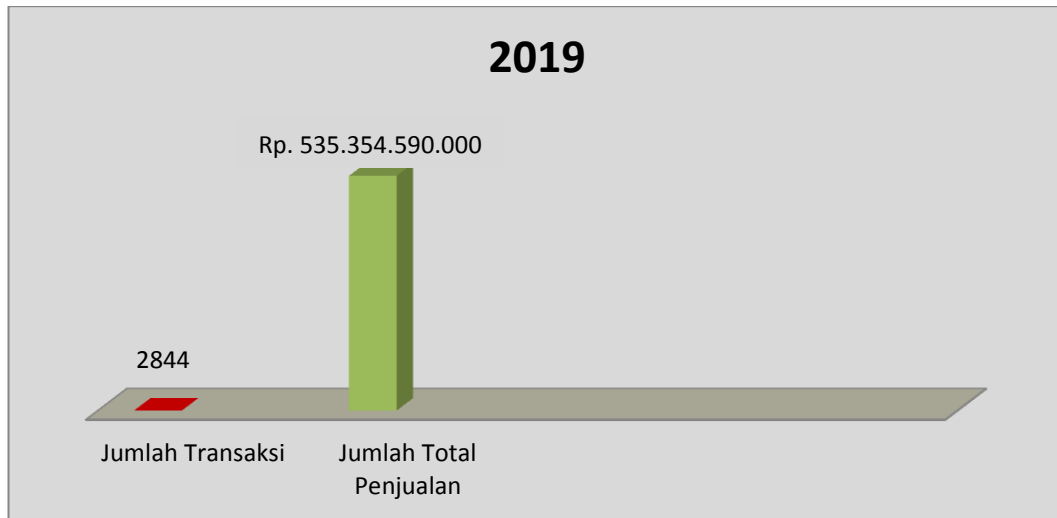
Jumlah Kelompok Penyedia Aktif dan tidak Aktif Maret sd Agustus Tahun 2019



Sumber: Data diolah Peneliti dari Kantor Dalbang Kota Yogyakarta, 2019

Grafik 5.6 jumlah kelompok penyedia kuliner program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta aktif dan tidak aktif dari maret sampai dengan agustus tahun 2019 berjumlah 127, yang aktif 71 yang tidak aktif 56. Kemudian grafik 5.2 jumlah transaksi kelompok penyedia kuliner dengan pemerintah Kota Yogyakarta berjumlah 2844 kali dan jumlah total penjualan dari penyedia kuliner Rp.535.354.590.000.00.

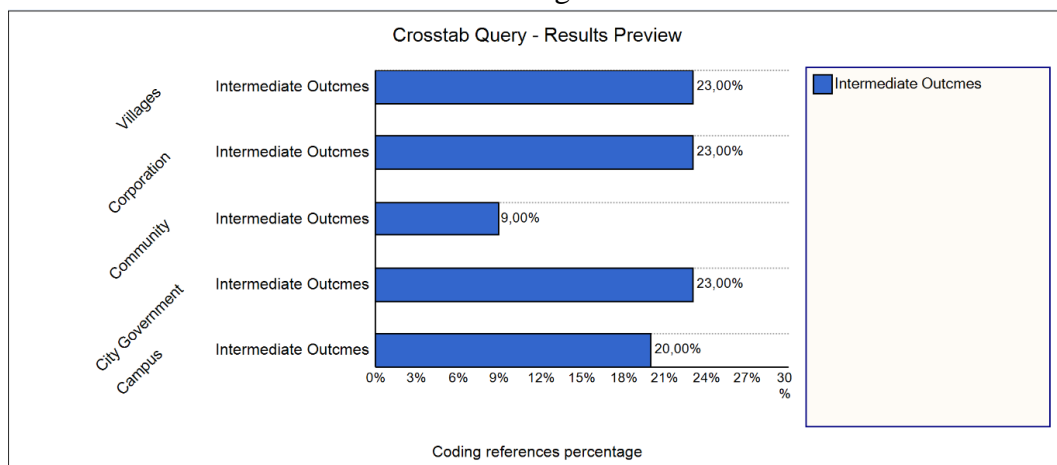
Grafik 5.6  
 Jumlah Transaksi dan Jumlah Total Penjualan Maret sd Agustus Tahun 2019



Sumber: Data diolah Peneliti dari Kantor Dalbang Kota Yogyakarta, 2019

*Collaborative governance* dalam program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh lima *stakeholders* (Pemerintah Kota, Korporasi, Kampus, Komunitas dan Kampung) dengan *intermediate outcomes*.

Gambar 5.7  
*Collaborative Governance dengan Intermediate Outcomes*



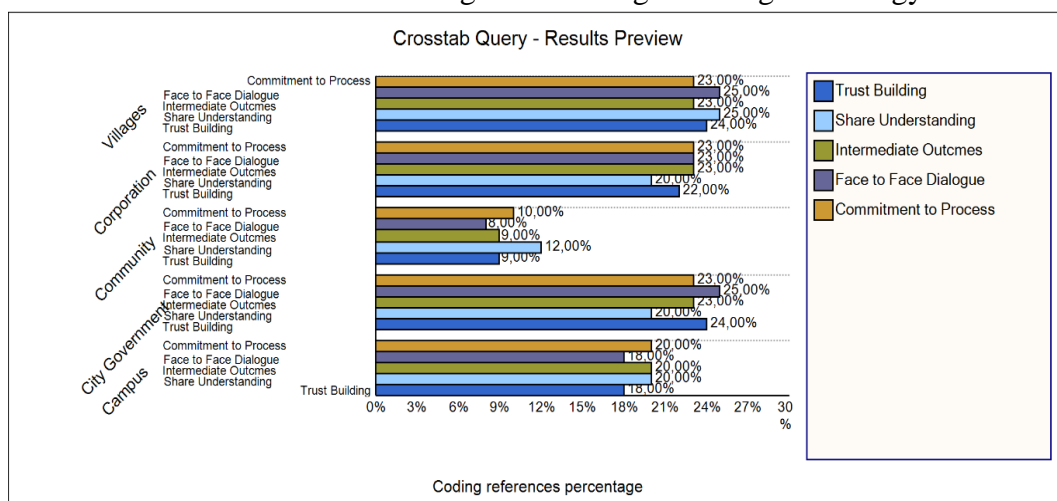
Sumber : Data diaolah dengan Nvivo 12 Plus, 2019

Gambar 5.7 menyatakan bahwa *collaborative governance* program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh lima *stakeholders* (Pemerintah

Kota, Korporasi, Kampus, Komunitas dan Kampung) dengan *intermediate outcomes* yang paling dominan yaitu tiga *stakeholders*. Mulai dari Pemerintah Kota 23,00%, Korporasi 23,00%, Kampung 20,00%, dan terakhir Komunitas 9,00% yang paling rendah.

Berikut lima indikator *collaborative governance* dengan dialog/tatap muka (*face to face dialogue*), membangun kepercayaan (*trust building*), komitmen bersama (*commitment to process*), pemahaman bersama (*shared understanding*) and hasil sementara (*intermediate outcomes*)

Gambar 5.8  
*Collaborative Governance Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta*



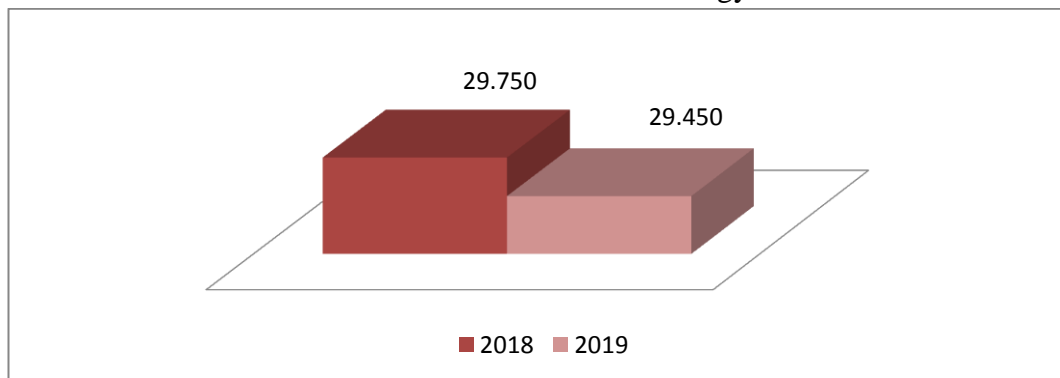
Sumber : Data diaolah dengan Nvivo 12 Plus, 2019

Gambar 5.8 di atas dalam proses *collaborative governance* program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta dari lima indikator *face to face dialogue*, *trust building*, *commitment to process*, *shared understanding* and *intermediate outcomes* yang paling dominan yaitu *face to face dialogue* 25,00%. Kemudian *shared understanding* 25,00%, *trust building* 24,00%, *commitment to process* 23,00% dan *intermediate outcomes* 23,00%. Dalam *collaborative governance*

antar *stakeholders* yang paling dominan yaitu Kampung artinya program yang dibuat cukup berhasil berdampak kepada masyarakat. Kemudian Pemerintah Kota nomor dua yang paling aktif dalam program tersebut dan Korporasi nomor tiga, Kampus nomor empat terakhir Komunitas.

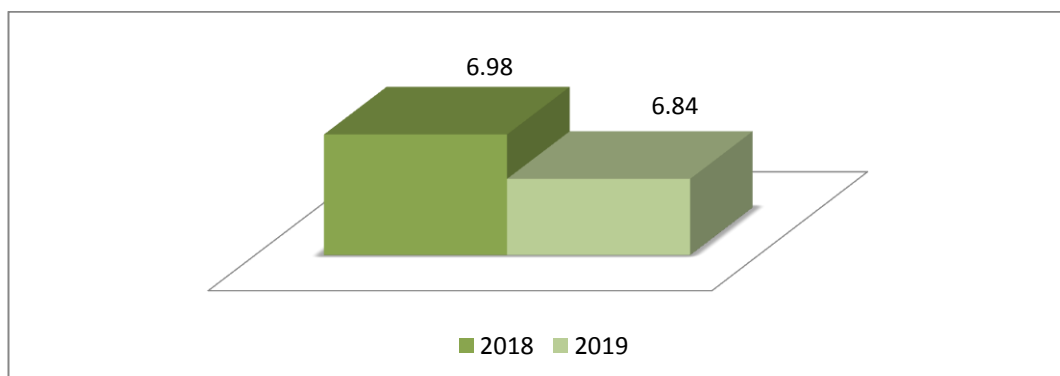
Program Gandeng Gendong dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kota Yogyakarta tidak banyak memberi dampak yang positif terhadap jumlah kemiskinan. Hal tersebut karena pelaksanaan program Gandeng Gendong belum maksimal dalam sosialisasi, pemberdayaan dan pelatihan kepada masyarakat, sehingga tidak banyak memberi perubahan terhadap penurunan kemiskinan;

Grafik 5.7  
Jumlah Penduduk Miskin di Kota Yogyakarta



Sumber: Data BPS Kota Yogyakarta, 2020

Grafik 5.8  
Persentase Penduduk Miskin



Sumber: Data BPS Kota Yogyakarta, 2020



Persentase penduduk miskin Kota Yogyakarta di tahun 2018 6.98 dan di tahun 2019 6.84, harus di akui memang program Gandeng Gendong tidak banyak memberi perubahan terhadap kemiskinan di Kota Yogyakarta. Perubahan yang tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kota Yogyakarta di akibatkan beberapa faktor; pertama minimnya sosialisasi program dan agenda kepada masyarakat. Kedua masih belum maksimalnya pemberdayaan dan pelatihan *soft skiil* dan *hard skiil* kepada masyarakat dan dari pihak Korporasi sebagai basisnya penjualan produk UKM masyarakat tidak memfasilitasi dengan baik. Kemudian dari sisi *stakeholders* masih belum maksimalnya *collaborative governance* sehingga berefek memburuknya pelaksanaan program Gandeng Gendong.